

PEMERINGKATAN IKLIM INVESTASI 33 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2008



BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Tim Peneliti

TIM PENELITIAN KPPOD

Ketua Tim:

P. Agung Pambudhi

Manager Penelitian:

Robert Endi Jaweng, S.I.P

Peneliti Senior:

Ig. Sigit Murwito, S.Sos, ME

Peneliti:

Firman Bakri Anom, SH.

Ratnawati, SE

Boedi Rezha, SE

Asisten Peneliti:

Sri Mulyati, S.I.P

Winantyo

M. Retno Budiastuti, SH.

KOORDINATOR PENELITIAN PROVINSI

Teuku Zulham, SE, Msi (<i>Aceh</i>)	Windu Putra, SE, M.Si (<i>Kalimantan Barat</i>)
Murbanto Sinaga, MA (<i>Sumatera Utara</i>)	Noorhalis Majid, SH (<i>Kalimantan Selatan</i>)
Edi Indrizal, M.Si (<i>Sumatera Barat</i>)	Yulia Raemae, S.Hut (<i>Kalimantan Tengah</i>)
M. Ansor, MA (<i>Riau</i>)	Purwadi, SE, M.Si (<i>Kalimantan Timur</i>)
Zamzami A Karim, MA (<i>Kepulauan Riau</i>)	Dr. Grevo Gerung (<i>Sulawesi Utara</i>)
Dr. H. Didik Susetyo, SE., MSi. (<i>Sumsel</i>)	Drs. Budiman Jaya A.A. M.Si (<i>Sulawesi Tengah</i>)
Lizar Alfansi, Phd (<i>Bengkulu</i>)	H.Halim, S.E., MS. (<i>Sulawesi Tenggara</i>)
Dr. Syurya Hidayat, SE, ME (<i>Jambi</i>)	Drs. H. Bernard, MS. (<i>Sulawesi Selatan</i>)
Marselina, SE MPM (<i>Lampung</i>)	Arusdin Bone (<i>Gorontalo</i>)
Zulfriady, SE. MM (<i>Bangka Belitung</i>)	Sudirman Zuhdi, S.Sos, M.Si (<i>Sulawesi Barat</i>)
Wasi Gede Puraka, S.Sos (<i>DKI Jakarta</i>)	Dr. Arifin Bakti (<i>NTB</i>)
Dr. Yunizar (<i>Jawa Barat</i>)	Zet Ena, SE (<i>NTT</i>)
Dr. A. Sentot Suciarto, MP (<i>Jawa Tengah</i>)	George Corputty (<i>Maluku</i>)
Sukasmanto, SE, M.Si (<i>DI. Yogyakarta</i>)	Abdullah Ali (<i>Maluku Utara</i>)
Early Rahmawati, SE (<i>Jawa Timur</i>)	Drs. Muhammad Musaad, M.Si (<i>Papua</i>)
Samsul Arifin, M.S.E (<i>Banten</i>)	Ir. Achmad Rochani, MS (<i>Papua Barat</i>)
Taufik Hidayat, SP (<i>Bali</i>)	

Pengantar

Perkembangan pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Persoalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam era globalisasi adalah tingkat persaingan yang semakin tajam secara langsung diantara pemda Provinsi, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain persoalan external, di era otonomi daerah pemerintah Provinsi juga dihadapkan pada permasalahan internal. Secara kelembagaan, otonomi daerah memberikan tantangan perubahan peran/kewenangan Provinsi dalam penanaman modal setelah otonomi daerah yang tidak sebesar masa sebelum otonomi daerah.

Walau dalam banyak keterbatasan dan dihadapkan pada sejumlah persoalan, tetapi pemerintah Provinsi tetap memegang tanggung jawab dalam penciptaan iklim investasi di wilayahnya. Peran penting Pemprov terutama dalam hal perumusan perencanaan kebijakan bidang investasi di level Provinsi. Pemprov juga sebagai perencana pembangunan ekonomi regional, perencana tata ruang Provinsi, dan sebagai koordinator aktivitas ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelayanan di bidang investasi.

KPPOD bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melakukan survei di 33 Provinsi di Indonesia, untuk mengidentifikasi pemerintah provinsi yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi aktivitas usaha di daerah. Survei ini akan melihat iklim investasi di tingkat regional (Provinsi), yang salah satunya tercermin dari pelayanan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, serta faktor-faktor lingkungan dari aktivitas usaha yang dikelola oleh pemerintah Provinsi. Hasil survei inilah yang dijadikan dasar oleh BKPM untuk penganugerahan *Investment Award 2008* kepada Pemerintah Provinsi yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim investasi dan pelayanan kepada penanaman modal terbaik di Indonesia. Tujuan dari pemberian penghargaan tersebut salah satunya adalah untuk mendorong kompetisi antar daerah dalam meningkatkan iklim usaha mereka.

Hasil survei ini juga diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi investor dapat memperoleh gambaran mengenai regional spesifik yang menjadi referensi dalam keputusan pilihan lokasi investasi. Bagi pemerintah daerah Provinsi diharapkan dapat diperoleh profil iklim usaha daerahnya, untuk melihat kondisi, masalah dan pilihan kerja ke depan khususnya dalam konteks pelayanan investasi dan peningkatan daya saing investasi. Dan bagi KPPOD, bahan studi ini dapat dijadikan sebagai dasar advokasi kebijakan, baik di level pusat maupun Pemda Provinsi terkait. Semoga hasil studi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 2008

Tim Peneliti

Daftar Isi

Tim Peneliti	<i>ii</i>
Kata Pengantar	<i>iii</i>
Daftar Isi	<i>iv</i>
Daftar Diagram	<i>v</i>
Daftar Grafik	<i>v</i>
Daftar Kotak	<i>vi</i>
Bab I Latar Belakang	1
Bab II Methodologi	5
2.1 Indikator	5
2.2 Perhitungan Indeks	8
2.3 Data: Jenis dan Sumber	9
Bab III Indeks Iklim Usaha & Sejumlah Temuan	10
3.1 Indeks Keseluruhan Iklim Investasi Daerah	10
3.2 Sub Indeks Kelembagaan Pelayanan Penanaman Modal	11
3.3 Sub Indeks Promosi Investasi Daerah	13
3.4 Sub Indeks Komitmen Pemprov dalam Pengembangan Dunia Usaha	15
3.5 Sub Indeks Infrastruktur	18
3.6 Sub Indeks Akses Lahan Usaha	21
3.7 Sub Indeks Tenaga Kerja	23
3.8 Kondisi Keamanan Usaha	24
3.9 Kinerja Ekonomi Daerah	27
3.10 Sub Indeks Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah	28
Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rekomendasi	31
Lampiran:	
1. Daftar Indikator Penilaian	34
2. Provil 33 Provinsi	41

Daftar Diagram

1. Diagram Kriteria dan Bobot Penilaian	6
2. Diagram Profil Responden Perusahaan	9
3. Diagram Insentif Investasi yang diberikan Pemprov	17
4. Diagram Kualitas Pelayanan Perizinan di Tingkat Provinsi	17
5. Diagram Permasalahan Energi Listrik	19
6. Diagram Ketersediaan dan Kondisi Jalan Darat yang Tidak Baik	20
7. Diagram Kekurangan Fasilitas Pelabuhan Laut dan Udara	20
8. Diagram Tingkat Hambatan Akses Lahan	22
9. Diagram Tingkat Gangguan Konflik dan Keamanan Berusaha	26
10. Diagram Pihak Paling Sering Melakukan Pungutan kepada Pengusaha	26

Daftar Grafik

1. Grafik Indeks Iklim Investasi Daerah (Indeks Total)	10
2. Grafik Indeks Kelembagaan Instansi Penanaman Modal Provinsi (IPMP)	12
3. Grafik Indeks Promosi Investasi Daerah	14
4. Grafik Indeks Komitmen Pemprov dalam Pengembangan Dunia Usaha	16
5. Grafik Indeks Infrastruktur Fisik	19
6. Grafik Indeks Akses Lahan untuk Usaha	22
7. Grafik Indeks Tenaga Kerja	23
8. Grafik Indeks Keamanan Berusaha	25
9. Grafik Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	27
10. Grafik Indeks Peranan Swasta dalam Perekonomian Daerah	29

Daftar Kotak

1. Kotak 1 Variabel Penilaian Sub Indeks Kelembagaan Pelayanan	11
2. Kotak 2 Variabel Penilaian Sub Indeks Promosi Investasi Daerah	13
3. Kotak 3 Variabel Penilaian Sub Indeks Komitmen Pemprov dalam Pengembangan Dunia Usaha	15
4. Kotak 4 Variabel Penilaian Sub Indeks Infrastruktur	18
5. Kotak 5 Variabel Penilaian Sub Indeks Akses Lahan Usaha	21
6. Kotak 6 Variabel Penilaian Sub Indeks Tenaga Kerja	23
7. Kotak 7 Variabel Penilaian Sub Indeks Keamanan Berusaha	24
8. Kotak 8 Variabel Penilaian Sub Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	27
9. Kotak 9 Variabel Penilaian Sub Indeks Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah	28

**PEMERINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
33 PROPINSI DI INDONESIA
TAHUN 2008**

**KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (KPPOD) –
BADAN KOORDINASI PANANAMAN MODAL (BKPM)
JAKARTA 2008**

Bab I

Latar Belakang

Peran investasi tidak saja menjadi kebutuhan temporer bagi perekonomian suatu negara yang sedang dalam fase pemulihan krisis tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi berlangsungnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam upaya membangun perekonomian nasional maupun di tingkat regional dan lokal, kegiatan investasi amat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Dalam kerangka pembangunan secara keseluruhan, investasi menghasilkan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan memberi manfaat bagi banyak pihak: perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan konteks lingkungan yang berpengaruh kuat bagi penciptaan iklim usaha. Sumbangan penting investasi di atas hanya akan terwujud jika didukung oleh tersedianya iklim berusaha yang kondusif. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia dewasa ini, serta menimbang bahwa iklim investasi memiliki kaitan kuat dengan faktor-faktor lokasi tertentu, peran pemda dan masyarakat daerah menjadi krusial. Kini terbuka kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah, dan pada sisi lain keleluasaan untuk merancang kebijakan investasi dan institusi-institusi yang relevan.

Dari berbagai studi iklim investasi & daya saing daerah di Indonesia sepuluh tahun terakhir, sebagian besar mengambil fokus pada level kabupaten/kota. Dalam konteks kewenangan desentralisasi, hal itu bisa dipahami karena desain otonomi kita memang bertitik berat di kabupaten/kota, dan sebagian besar faktor pengaruh bagi

pembentukan iklim usaha daerah ada di ranah tersebut. Namun, itu tak berarti potret iklim investasi di wilayah provinsi tak penting untuk dilihat, terutama kalau menggunakan sudut pandang pelaku usaha. Lingkungan berusaha di level provinsi tetap ikut menentukan iklim usaha di ranah lokal maupun di level kewilayahan provinsi secara umum, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa alasan berikut. Pertama, *economies of scale*. Fakta menunjukkan, batas wilayah pemerintahan tidak selalu jatuh berhimpitan dengan skala ekonomi dan kegiatan usaha. Justru sering terjadi, basis potensi ekonomi atau ruang gerak usaha melampaui batas yurisdiksi kabupaten/kota sehingga membutuhkan peran pemda provinsi yang memang berkewenangan atas urusan lintas daerah. Kedua, *regional specific*. Para calon investor yang mau berusaha di kabupaten/kota, bahkan di lokasi lebih terbatas, tetap saja terlebih dulu mencermati skala makro, yakni lingkungan regional dan pola kebijakan khusus yang berlaku secara keseluruhan di wilayah provinsi sebelum menentukan pilihan lokasi per lokasi investasi. Ketiga, *externality impact*. Sebagai penentu kebijakan di tingkat kewilayahan (perencanaan, tata ruang dan lain-lain.), jangkauan dampaknya tentu mempengaruhi pilihan kebijakan pemda kabupaten/kota mengenai penanaman modal.

Daerah-daerah yang saat ini memiliki koordinasi antar-pemerintahan yang efektif, jelas terlihat adanya peran pemda provinsi bagi sinkronisasi kebijakan mereka. Keempat, peran provinsi dalam “mengarahkan” pilihan lokasi investor dan “mendistribusi” proyek-proyek swasta yang masuk melalui pemda provinsi maupun juga investasi (belanja modal) dari anggaran provinsi itu sendiri. Di sini, daerah tentu berkepentingan mengetahui garis kebijakan provinsi ihwal distribusi proyek-proyek investasi tersebut. Semua alasan tersebut mendorong perlunya pemetaan iklim usaha di level Provinsi, termasuk di dalamnya gambaran peran dan kebijakan dari birokrasi pemerintahan Provinsi.

Lingkungan berusaha di level provinsi tetap ikut menentukan iklim usaha di ranah lokal maupun di level kewilayahan provinsi secara umum, terkait dengan faktor eksternalitas, *economies of scale*, *regional-specific*, dan peran Pemda untuk fasilitasi

kebijakan, koordinasi dan pengendalian aktivitas penanaman modal di wilayah Provinsi. Semua itu mendorong perlunya pemetaan iklim usaha di level Provinsi, termasuk di dalamnya peran pemerintahan Provinsi.

Survei iklim usaha di level provinsi ini merupakan potret atas kinerja sejumlah variabel yang mempengaruhi lingkungan usaha di suatu wilayah provinsi. Mengambil lokasi studi di 33 provinsi yang ada di Indonesia, survei ini hendak mengukur tingkat kinerja dari 10 indikator dalam setiap provinsi tersebut. Masing-masing indikator diberikan bobot yang berbeda untuk menunjukkan derajat pengaruh dari suatu indikator terhadap keseluruhan indikator. Hasil pembobotan menggambarkan nilai lebih pada sejumlah indikator proses, khususnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan di bidang ekonomi dan pelayanan usaha (*local economic governance*), dibandingkan indikator capaian, warisan, atau bukan hasil kerja langsung Pemda. Pada setiap provinsi ditampilkan indeks kinerja dari setiap indikator maupun agregat dari semua indeks tersebut yang disebut indeks keseluruhan atau indeks iklim usaha di suatu provinsi. Proses terakhir adalah perbandingan indeks antar semua provinsi dalam bentuk susunan peringkat provinsi terbaik bagi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerja sama untuk pertama kalinya melakukan survei iklim usaha yang mencakup lengkap 33 provinsi. Pengalaman KPPOD yang sudah melakukan ragam pekerjaan sejenis sejak tahun 2001, dukungan jejaring kerja dari partner lokal di perguruan tinggi dan lembaga kajian di 33 provinsi, dan bantuan pendanaan serta suplai informasi dan produk kebijakan terbaru yang diberikan BKPM memungkinkan berlangsung suksesnya survei tersebut. Hasil studi ini menjadi bahan dasar bagi pertimbangan pemerintah dalam memberikan penghargaan (*Investment Award*, 2008) kepada provinsi yang berkinerja bagus dalam iklim investasi.

Isi keseluruhan penelitian ini berusaha menjawab sejumlah pertanyaan utama seputar upaya penciptaan iklim usaha dan peran provinsi di dalamnya. Dari pertanyaan umum, misalnya, mengenai gambaran iklim usaha di level provinsi, lalu

bagaimana peran pemda Provinsi dalam memfasilitasi penanaman modal dalam domain kewenangannya, dan seberapa efektif fungsi pemda Provinsi tersebut untuk mengkoordinasi aktivitas investasi di level kabupaten/kota maupun antar kabupaten/kota yang dalam wilayah yurisdiksinya.

Bertolak dari berbagai pertanyaan penelitian tersebut, tujuan kegiatan ini kiranya jelas, yakni dengan hasil survei diharapkan bisa memberikan peta gambaran iklim usaha, mendorong Pemda untuk semakin memperbaiki kinerja iklim usahanya dan daya saing (kompetisi) antar-daerah, serta masukan bagi Pemda Provinsi bagi upaya peningkatan koordinasi penanaman modal dengan Pemda Kabupaten/Kota. Bagi KPPOD, berbagai hasil tersebut tentu penting sebagai bahan dasar advokasi, sementara pihak BKPM akan memanfaatkannya sebagai masukan bagi pembaruan kebijakan lebih lanjut dan peningkatan kinerja dalam kerangka fasilitasi penanaman modal secara nasional.

Bab II

Metodologi

2.1. Indikator

Kerangka pikir yang mendasari survei ini berangkat dari asumsi pentingnya pengaruh iklim usaha sebagai konteks lingkungan makro bagi pembangunan ekonomi daerah, aktivitas usaha dan produktivitas perusahaan di suatu wilayah. Kondisi *local specific* yang berbeda dalam iklim usaha di suatu daerah akan mempengaruhi perbedaan kinerja investasinya dari daerah lain.

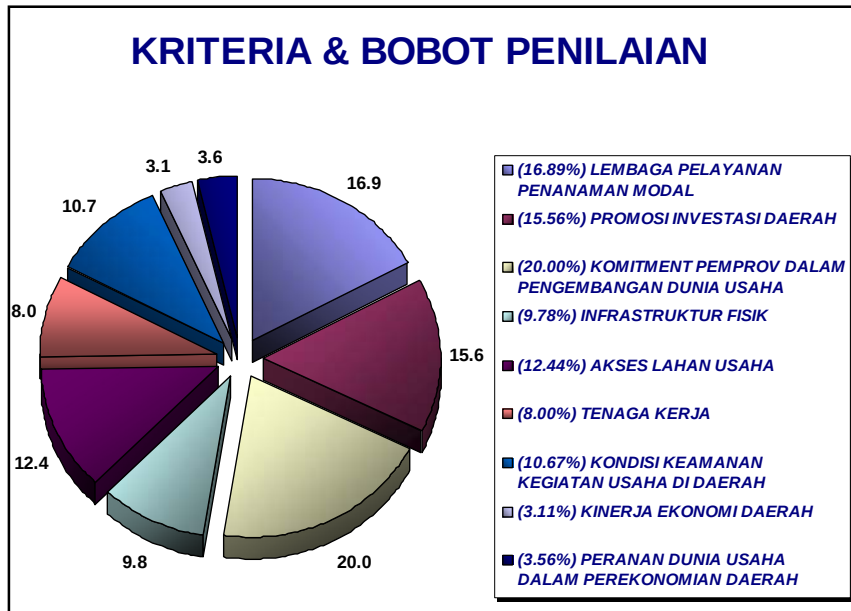
Di level provinsi, setidaknya menurut studi ini, iklim usaha tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang terkait satu sama lain, dengan derajat pengaruh berbeda antar faktor. Dengan dasar pikir demikian, dalam studi ini ditetapkan sembilan indikator survei pemeringkatan iklim usaha Provinsi 1, yakni: (1) Kelembagaan Pelayanan Penanaman Modal, (2) Promosi Investasi Daerah, (3) Komitmen Pemda, (4) Infrastruktur, (5) Akses Lahan Usaha, (6) Tenaga Kerja, (7) Keamanan Usaha, (8) Kinerja Ekonomi Daerah, dan (9) Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah. Melalui forum *expert judgement*, setiap indikator tersebut ditetapkan bobotnya masing-masing yang mencerminkan derajat pentingnya satu indikator terhadap indikator lainnya dalam membentuk iklim usaha (Lihat Grafik 1).

Prioritas pada indikator "proses".

Dari susunan bobot dalam Grafik 1, terlihat bahwa Komitmen Pemda merupakan indikator paling penting dalam mempengaruhi kondusifitas iklim usaha, sementara Kinerja Ekonomi dan Peranan Dunia Usaha, sebagai dua variabel output, menempati urutan pengaruh yang relatif sama kecilnya. Seperti halnya indikator komitmen Pemda tersebut, secara umum indikator-indikator lain yang terkait dengan proses, kinerja dan upaya langsung Pemda memiliki bobot pengaruh lebih besar

¹ Daftar indikator dan berbagai turunan variabelnya dapat dilihat pada Lampiran I

dibandingkan dengan indikator-indikator hasil dan indikator-indikator anugerah (*endowment*) atau yang merupakan hasil peranan non-Pemda (Swasta/Masyarakat). Secara metodologis, pembobotan ini menjamin standar pengukuran yang bisa diperbandingkan antar daerah dan kesempatan sama bagi semua Provinsi untuk mendapatkan peringkat terbaik.



Kelembagaan Penanaman Modal: indikator ini secara signifikan (lihat prosentase bobot) mempengaruhi iklim usaha daerah, yang mencakup keseluruhan proses pelayanan seperti kelancaran proses perijinan, efektivitas promosi, dan lain-lain.

Promosi Investasi Daerah: pengenalan Pemda akan potensi daerahnya, ketepatan dalam memilih sektor unggulan, efisiensi dan efektivitasnya untuk mempromosi potensi unggulan tersebut adalah rangkaian upaya yang membantu dan memudahkan para investor dalam membuat keputusan lokasi investasi secara tepat.

Program Pengembangan Usaha: peran negara (Pemda) yang tidak semata menjamin iklim usaha tetapi lebih jauh memberi insentif dan bantuan nyata bagi kelancaran aktivitas usaha adalah nilai tambah yang dinilai tinggi oleh para pelaku usaha.

Peranaan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah: ketersediaan sejumlah faktor bagi kelancaran investasi sebagai hasil peran pelaku usaha, seperti keberadaan lembaga keuangan, merupakan prasyarat awal yang pasti diperlukan

investor dalam memulai usaha, sekaligus petunjuk tingkat perkembangan ekonomi yang sudah ada di suatu daerah.

Infrastruktur: ketersediaan, kualitas dan kebijakan tata kelola infrastruktur yang memadai memungkinkan mobilitas barang dan manusia yang amat diperlukan dalam jenis investasi apa pun, dimana para pelaku usaha akan lebih fokus kepada upaya peningkatan produktivitas perusahaannya dan tidak dibebani oleh pelimpahan kewajiban Pemda untuk menjamin sarana-prasarana dasar.

Kemahalan Investasi: Biaya berbisnis legal yang mahal (tidak proporsional) dan ancaman ketidakpastian pungutan liar meningkatkan biaya, resiko dan kesempatan persaingan para pelaku usaha. Ini sekaligus sinyal buruk ihwal rendahnya komitmen Pemda bagi dukungan jangka panjang (berkelanjutan) pembangunan ekonomi.

Akses Lahan Usaha: akses tanah dan kepastian status formalnya sering menjadi kendala memulai dan melanjutkan usaha, terutama yang berbasis lahan luas. Upaya memastikan ketersediaan dan legalitas hukumnya adalah prioritas tinggi dalam tuntutan pelaku usaha.

Tenaga Kerja: ketersediaan/kualitas pekerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja merupakan jaminan bagi adanya produktivitas dalam kegiatan usaha. Secara sosial dan ekonomi, tentu jauh lebih baik kalau sumber tenaga kerja adalah berasal dari itu sendiri, yang direkrut secara bebas-profesioanl dan tanpa proteksionisme berlebihan.

Kemanan Dunia Usaha: lingkungan sosial, ekonomi, politik di daerah maupun lingkungan keamanan usaha suatu perusahaan menjamin lancarnya kegiatan dan terprediksinya biaya-resiko eksternal para pelaku usaha. Kapasitas Pemda untuk menjamin dan/atau menangani gangguan keamanan memastikan jaminan perlindungan usaha dan keselamatan segenap pelaku ekonomi itu sendiri.

Kinerja Ekonomi Daerah: indikator ekonomi suatu daerah, seperti pertumbuhan investasi dan ekonomi, maupun indikator sosio-ekonomi seperti tingkat HDI, adalah lingkungan makro yang berdampak signifikan bagi produktivitas usaha.

2.2 Perhitungan Indeks

Pengolahan data dilakukan dengan menggabungkan variabel kuantitatif (variabel kontinyu) dan kualitatif (diskrit) dengan menghilangkan satuan data masing-masing variabel. Hal ini dilakukan karena dua jenis variabel yang memiliki satuan yang berbeda (kuantitatif dan kualitatif) tidak dapat diagregasikan secara langsung. Gabungan variabel-variabel tersebut membentuk satu variabel baru (variabel komposit), yang dilakukan melalui proses standarisasi setiap variabel dengan menggunakan *z-score*, menghitung rata-rata *z-score* setiap responden Provinsi, dan menghitung variabel komposit setiap Provinsi.

Langkah-langkah penghitungan indeks:

1. Standarisasi setiap variabel dengan menggunakan *z-score* dengan rumus: sebagai berikut:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{x}}{\sigma_x}$$

Dimana z adalah variabel yang dinormali-sasikan, $(\bar{x})$ adalah nilai rata-rata dari variabel x satu Provinsi, $(\bar{x})$ adalah nilai rata-rata dari semua rata-rata Provinsi, dan (σ) adalah standar deviasi dari nilai rata-rata semua Provinsi.

2. Menghitung rata-rata *z-score* setiap responden dan Provinsi indikator k :

$$\bar{z}_{ikl} = \sum_{j=1}^m z_{ijkl} / m$$

3. Menghitung indikator variabel komposit k setiap Provinsi:

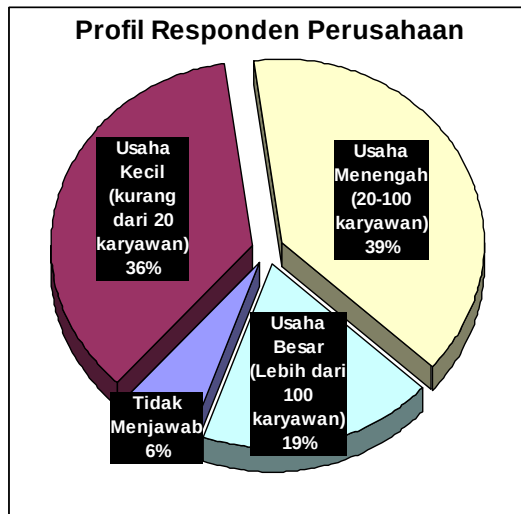
$$t_{kl} = \left(\sum_{i=1}^n (\bar{z}_{ik} - \min(\bar{z}_{ik})) / dif_k * 100\% \right) / n$$

dimana:

$$dif_k = \max(\bar{z}_{ik}) - \min(\bar{z}_{ik})$$

4. Menghitung Indeks Total setiap Provinsi: merupakan akumulasi setiap hasil perkalian setiap sub indeks dengan bobot setiap sub indeks.

2.3 Data: Jenis dan Sumber



Survei pendapat pelaku usaha di semua Provinsi di Indonesia.

Materi utama studi ini berasal dari data primer-kualitatif, yakni persepsi para pelaku usaha di 33 Provinsi. Keseluruhan responden kategori ini berjumlah 1.144 orang, dengan rincian berdasarkan skala usaha (jumlah tenaga kerja): 36 % dari pelaku usaha kecil (1-19 tenaga kerja), 39,1 % dari pelaku usaha menengah (20-99 tenaga kerja), dan 18,8 % dari pelaku usaha besar

(> 100 tenaga kerja), dan sisa responden yang tak ada keterangan sebesar 6,1%. Masih terkait jenis data primer, di luar katgeori responden pelaku usaha tersebut, survei ini juga menjangring persepsi dan data kuantitatif dari narasumber kunci asosiasi usaha (Kadinda Provinsi) yang diwakili oleh pengurus (Ketua/Sekjen) dan kalangan Pemda Provinsi yang diwakili Kepala/ Kabid BKPM dan Bappeda.

Sementara untuk sebagian indikator dan variabel tertentu, materi studi ini juga bersumber dari data sekunder, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti Peraturan Daerah (Perda), LKPJ Gubernur, Perencanaan Daerah, APBD, Infrastruktur, Ketenagakerjaan, Statistik Ekonomi, dan sebagainya. Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan, melalui isian kuesioner, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengumpulan data dari lembaga resmi Pemda dan instansi vertikal (BPS).

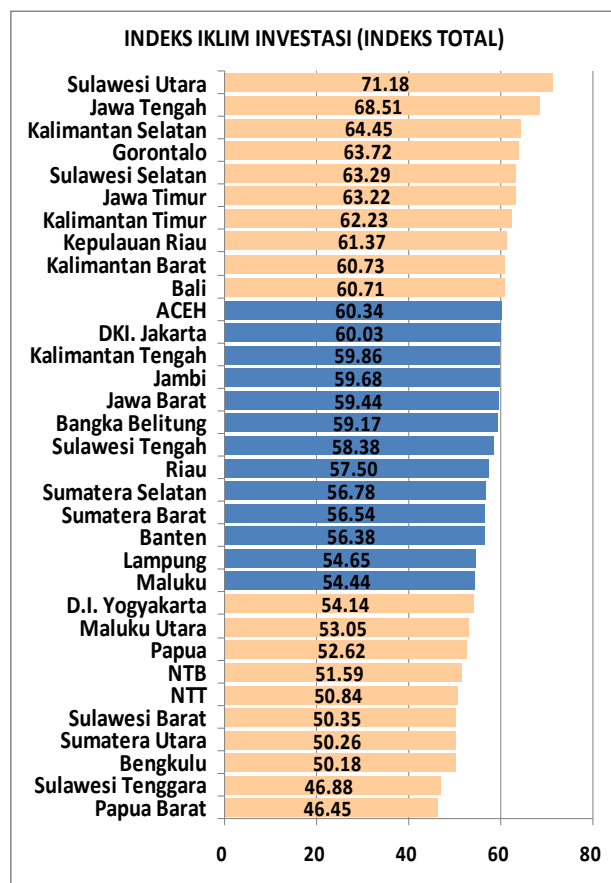
Bab III

Indeks Iklim Usaha & Sejumlah Temuan

Laporan ini menjabarkan temuan-temuan pokok penelitian dan hasil indeks yang ditampilkan dalam dua kategori: sub-indeks dari setiap indikator, dan indeks keseluruhan iklim usaha di Provinsi. Indeks sub-indikator memperlihatkan kinerja daerah untuk setiap indikator penelitian, sedangkan indeks iklim usaha merupakan kinerja keseluruhan 9 (sembilan) indikator dalam iklim investasi daerah.

3.1 Indeks Keseluruhan Iklim Investasi Daerah

Peringkat Iklim Investasi Daerah selain ditentukan oleh kinerja tiap indikator penilaian, juga ditentukan oleh bobot tiap indikator. Pembobotan tiap indikator



didasari pandangan teoritis yang dikonfirmasi dengan hasil survei, bahwa tiap indikator mempunyai pengaruh yang berbeda dalam menentukan iklim investasi daerah. Selain itu, guna menghitung indeks, bobot tiap indikator dapat dijadikan acuan bagi prioritas kebijakan daerah.

Sebagai hasilnya, salah satu temuan pokok survei ini menunjukkan: empat Provinsi luar Pulau Jawa mendominasi 5 peringkat teratas, dan hanya satu Provinsi di pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berhasil

masuk dalam peringkat 5 teratas.

Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan dan memiliki potensi pariwisata, perikanan dan perkebunan, menempati peringkat tertinggi untuk nilai total indeks iklim investasi. Provinsi Sulawesi Utara dinilai baik di seluruh indikator penilaian, utamanya pada indikator Akses Lahan (skor 82,51), Komitmen Pemda dalam Pengembangan Dunia Usaha (skor 72,85) dan Kelembagaan IPMP (skor 72,59). Dengan akses lahan yang mudah, didukung komitmen Pemda dalam mengembangkan dunia usaha dan kelembagaan pelayanan investasi menjamin hadirnya iklim usaha yang baik.

Sementara itu, Provinsi Papua Barat menempati peringkat terendah indeks iklim investasi daerah. Provinsi di kawasan timur ini dinilai memprihatinkan dalam hampir semua indikator. Para responden menilai peran Pemda dalam upaya menciptakan iklim berusaha tak maksimal untuk semua indikator. Hal demikian, misalnya, tercermin dari rendahnya fasilitas infrastruktur, akses lahan yang kurang mendukung, dan keamanan berusaha yang belum terjamin. Kurang baiknya iklim investasi secara simultan membuat kinerja ekonomi daerah yang kurang maksimal pula, dan sulit merangsang keterlibatan swasta dalam perekonomian daerah yang kurang.

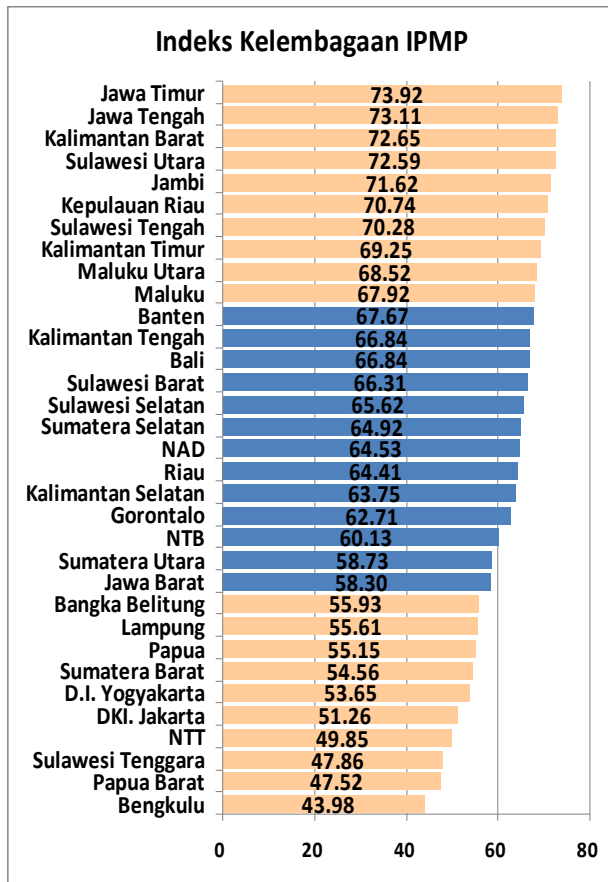
3.2 Sub Indeks Kelembagaan Pelayanan Penanaman Modal

Variable Penilaian:

- Kedudukan Institusi Penanaman Modal di Daerah
- Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal antara IPMP dan SKPD terkait
- Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pembangunan Daerah antara Pemprov dan Kabupaten/Kota
- Upaya Pemda memfasilitasi proses persetujuan Investasi
- Pengendalian Penanaman Modal

Untuk tingkat provinsi dalam Sub Indeks Kelembagaan IPMP ini tampaknya faktor Jawa atau luar Jawa tidak berpengaruh. Hal ini berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh KPPOD untuk tingkat kabupaten/kota dimana kecenderungan daerah-daerah di Jawa lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa. Pada peringkat pertama untuk Sub Indeks Kelembagaan IPMP diduduki oleh Jawa Timur dengan indeks 73.92, dan berturut-turut diikuti oleh Jawa Tengah, Kalimantan Barat,

Sulawesi Utara dan seterusnya. Yang menarik untuk dicatat adalah DKI Jakarta menjadi salah satu Provinsi yang berada di 5 peringkat terbawah dalam indikator ini.



Dari salah satu variabel yang cukup strategis dalam survei ini menunjukkan, sebagian besar daerah telah memiliki institusi penanaman modal independen, yakni berbentuk Badan dan dipimpin oleh pejabat Eselon 2. Dari survei ini diketahui bahwa 30 IPMP berada setingkat Badan, 3 IPMP berupa Biro/Bidang dibawah dinas/badan terkait. Namun 1 provinsi dalam proses menjadi biro dibawah dinas. Provinsi D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara merupakan Provinsi yang memiliki institusi penanaman modal dengan bentuk lembaga Bidang. Sedangkan Provinsi Papua Barat merupakan

Provinsi dengan bentuk lembaga Biro.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan IPMP masih dijumpai sejumlah permasalahan. Dari survei ini diketahui bahwa 9 (27%) provinsi menyatakan tidak pernah berkoordinasi dengan kab/kota dalam perencanaan program penanaman modal dan promosi investasi. Sedangkan dilihat dari kualitas hubungan antara Provinsi dengan kabupaten, 64% Provinsi menyatakan tingkat koordinasi dengan kab/kota kurang efektif, padahal rata-rata keterlibatan Kab/Kota dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi sudah mencapai 75%.

Persoalan lain dalam pengembangan investasi di daerah salah satunya adalah benturan kebijakan antar level pemerintahan. Survei ini menemukan bahwa 49% Provinsi menyatakan sering terjadi benturan kebijakan investasi dengan pemerintah pusat. Sebagai akibatnya, 52% Provinsi menyatakan proses realisasi investasi pasca persetujuan menjadi sangat lambat. Pelaku usaha juga menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam rangka mempercepat proses perizinan dan persetujuan investasi sehingga menjadi realisasi kurang efektif. Sebanyak 50.3% pelaku usaha, menyatakan bahwa pemprov tidak optimal dalam upaya mempercepat proses perizinan ditingkat provinsi, dan 51.9% menyatakan bahwa upaya pemprov dalam berkoordinasi dengan pemkab/kota dalam percepatan proses perizinan investasi di tingkat kabupaten dirasakan kurang dan tidak optimal.

3.3 Sub Indeks Promosi Investasi Daerah

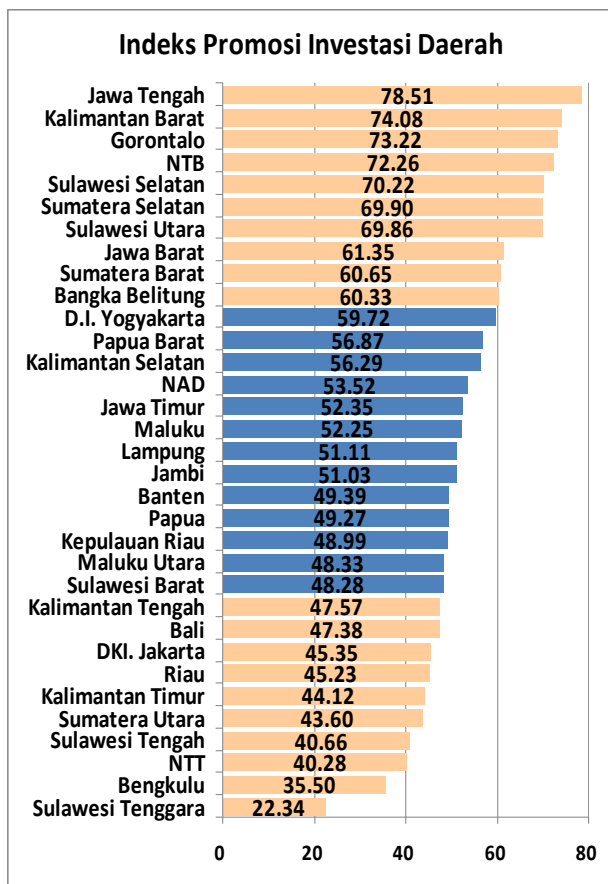
Variabel Penilaian:

- Informasi Potensi Investasi
- Upaya Pemprov untuk Promosi Investasi Daerah
- Efektifitas dan Efisiensi Program Promosi Investasi oleh Daerah

Salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi menarik investor adalah dengan melakukan kegiatan promosi investasi daerah. Sebagian besar Provinsi telah melakukan promosi ke luar daerah, baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam melakukan promosi investasi ke luar negeri, sebagian besar pemprov mengikut sertakan kabupaten/kota di wilayahnya. Namun demikian, masih ada 24% Provinsi menyatakan tidak efektif jika melibatkan kab/kota dalam promosi investasi ke luar negeri.

Untuk peringkat Sub Indeks Promosi investasi, terlihat bahwa posisi pertama adalah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diikuti secara berturut-turut oleh Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, dan Sulawesi Selatan. Sementara lima peringkat rendah berurutan dari posisi terbawah ditempati Sulawesi Tenggara, Bengkulu, NTT, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Salah satu instrumen penting dalam rangka promosi investasi adalah pemetaan potensi daerah. Tidak banyak daerah yang memiliki peta potensi daerah yang akan dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dari survei kepada pelaku usaha, 48.2% diantaranya menyatakan pemda belum memiliki data pemetaan potensi investasi, dan 42.8% yang lain menyatakan daerah telah memiliki data pemetaan potensi investasi, tetapi kualitas datanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha/investor.



Tampaknya upaya yang dilakukan pemprov dalam rangka promosi investasi dilakukan dengan cara-cara yang konvensional dan terkesan seadanya. Sebagai contoh, guna memudahkan investor dalam mengakses informasi berkaitan dengan potensi investasi, pemprov membentuk *website* promosi investasi, dan bahkan di sejumlah Provinsi tersedia situs tersendiri. Selain situs, upaya dalam menarik investasi juga dilakukan dengan membuat *regional branding*. 48% IPMP menyatakan daerahnya memiliki *regional branding* dalam rangka promosi investasi daerah,

33% diantaranya menyatakan belum optimal. Namun demikian 67% menyatakan tidak melakukan survei efektifitas dari *regional branding* yang telah mereka tetapkan. Dengan demikian kebanyakan daerah-daerah yang sudah membuat *regional branding* tidak bisa tahu secara pasti apakah program tersebut berjalan efektif atau tidak. Survei ini juga menemukan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang mengetahui keberadaan *branding* daerahnya yakni hanya 48.2% dari mereka. Dan

dari pelaku usaha yang mengetahui keberadaan *branding* daerah, ternyata 33.5% diantaranya menyatakan bahwa *branding* daerah mereka tidak sesuai dengan kondisi daerah.

Dari kacamata para pelaku usaha, meski telah banyak upaya-upaya promosi investasi yang telah dilakukan oleh pemprov, namun patut pula dicatat bahwa secara umum pelaku usaha memandang program promosi tersebut belum efektif. Pendapat pelaku usaha yang diwakili oleh asosiasi usaha (seperti KADIN, APINDO, dan lain-lain.), 55% menyatakan program promosi investasi yang dibuat oleh Pemprov selama ini tidak efektif. Khusus untuk promosi investasi ke luar negeri, 40% asosiasi usaha menyatakan bahwa program promosi investasi ke LN yang dilakukan pemprov tidak efektif. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Bappeda Provinsi dimana hanya 12% yang menyatakan tidak efektif.

3.4 Sub Indeks Komitmen Pemprov dalam Pengembangan Dunia Usaha

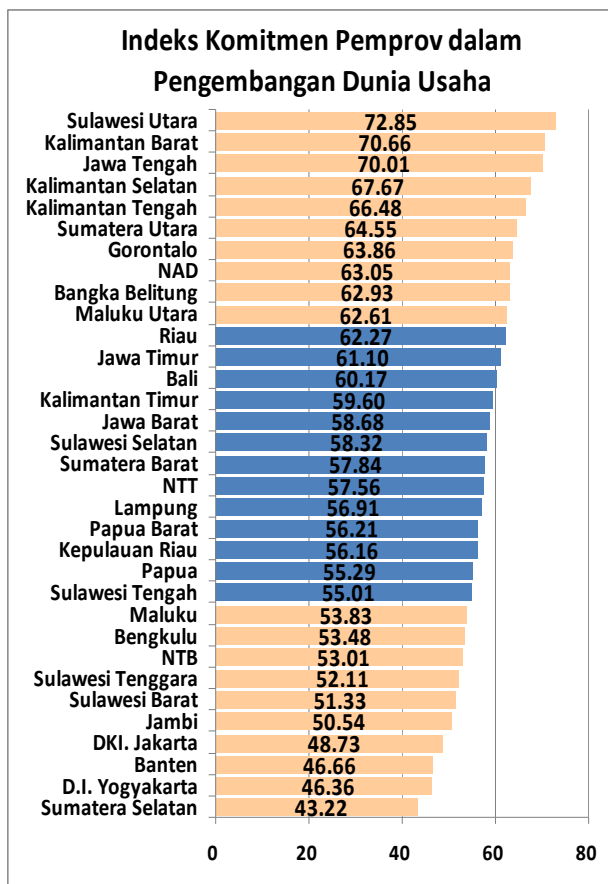
Variabel Penilaian:

- Interaksi antara Pemprov dengan Pelaku Usaha
- Insentif dan Bantuan Pemprov kepada Pelaku Usaha
- Manfaat Program Pemprov dalam Pengembangan Usaha
- Komitmen Pemprov Untuk Pengembangan Dunia Usaha
- Komitmen Pemprov Dalam Pengelolaan Prasarana Usaha
- Biaya dan Pelayanan Dunia Usaha

Sebagai bentuk pelayanan Pemda bagi dunia usaha, survei ini antara lain melihat keberadaan program pengembangan dunia usaha. Dan dari penilaian pelaku usaha menunjukkan bahwa masih minimnya program pengembangan dunia usaha, minimnya pelibatan pelaku usaha /Kadin dalam rencana program investasi, termasuk yang berbentuk forum komunikasi.

Untuk Sub Indeks Komitmen Pemprov dalam Pengembangan Dunia Usaha, daerah-daerah di Pulau Kalimantan mendominasi peringkat 5 teratas dimana Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah masuk daftar lima besar terbaik. Daerah-daerah di Jawa yang selama ini dipandang sebagai daerah dengan SDM dan

fasilitas yang maju, ternyata justru menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan dalam hal komitmen dalam pengembangan dunia usaha. Hal ini terlihat dari peringkat daerah-daerah di Jawa yang berada pada peringkat menengah, dan bahkan 3 propinsi di Jawa (DKI Jakarta, Banten, dan DIY), justru masuk dalam peringkat 5 terbawah. Hanya Jawa Tengah yang berada pada Peringkat ke 3, dan selebihnya pada peringkat menengah dan bawah.



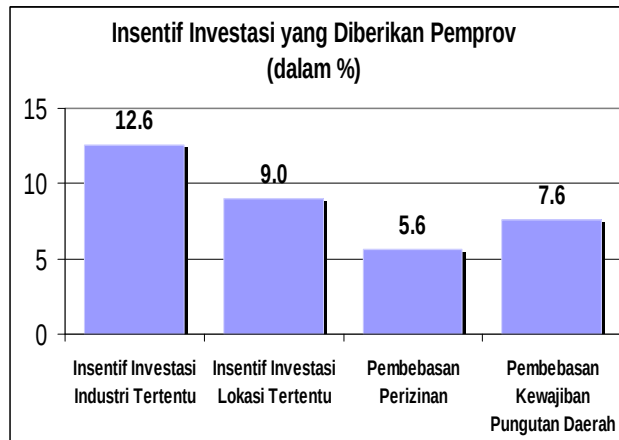
Dari sisi pelibatan dunia usaha dalam perencanaan dan program promosi investasi selama ini dinilai masih sangat rendah. Setidaknya ada 67% asosiasi usaha yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan program promosi investasi. Hal ini yang mungkin menjadi penyebab mengapa program pengembangan investasi masih belum sesuai dengan potensi daerah, yang dinyatakan paling tidak oleh 43% pelaku usaha.

Persoalan lain terkait dengan komitmen Pemprov dalam pengembangan sektor swasta

adalah bantuan atau pengembangan sektor swasta oleh Pemprov. Menurut responden dari Bappeda, 64% Provinsi memiliki program pengembangan dunia usaha, dan 49% menyatakan memberikan kredit modal usaha melalui dana APBD kepada pelaku usaha.

Untuk mendorong investasi salah satunya dilakukan dengan cara pemberian insentif baik melalui mempermudah perizinan maupun dengan pembebasan kewajiban pajak

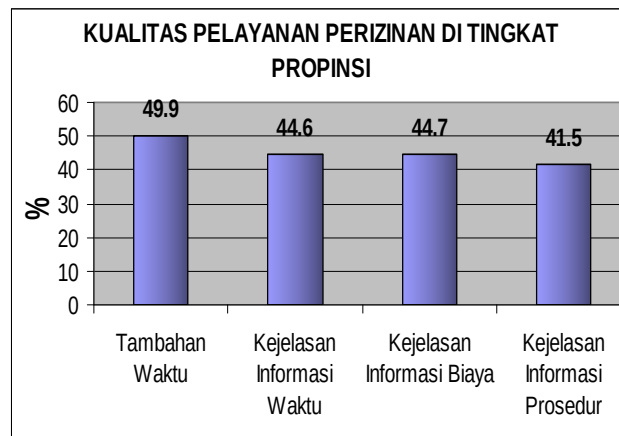
dan retribusi daerah. Namun demikian dari survei ini diketahui bahwa belum banyak daerah yang memberikan insentif bagi investor. Sebanyak 33% responden Pemda Provinsi menyatakan memberikan fasilitas/insentif bagi investor. Sayangnya program-



program pengembangan sektor swasta oleh Pemda ini kurang diketahui oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari survei kepada pelaku usaha, ternyata hanya 19% diantaranya yang mengetahui keberadaan program-program pemda terkait dengan pengembangan sektor swasta.

Namun demikian perlu diapresiasi bahwa dari yang mengetahui keberadaan program-program tersebut, ternyata 89.4% diantaranya menyatakan bermanfaat bagi dunia usaha, dan 88.2% diantaranya menyatakan pelaksanaan program tersebut efektif.

Dari aspek pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemprov, masih terlihat sejumlah permasalahan. Memang dari aspek biaya pelayanan dunia usaha dinilai relatif tidak bermasalah. Pada aspek ini, pelaku usaha masih memandang wajar atas biaya yang



dikeluarkan, meskipun mereka juga mengakui bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut kurang berdampak pada kemudahan kegiatan usaha. Hal tersebut terjadi karena beberapa aspek pelayanan masih kurang jelas dan pasti. Hal yang paling terlihat adalah masih ada tambahan waktu

(ketidaksesuaian waktu) pelayanan perizinan seperti yang diungkapkan oleh 49.9% pelaku usaha. Aspek lain adalah kejelasan informasi waktu, biaya, dan prosedur, yang masih kurang transparan, sehingga menjadi kendala aktivitas usaha.

Indikasi lain dari komitmen pemerintah provinsi dalam pengembangan investasi salah satunya adalah dalam hal kebijakan daerah. Dari penelusuran perda-perda di setiap provinsi yang dianalisis oleh Departemen Keuangan diketahui bahwa dari 7.791 perda yang dievaluasi ternyata 2.207 diantaranya (32.1%) direkomendasikan dibatalkan. Alasan pembatalan perda-perda tersebut karena melanggar berbagai prinsip yang harus dipenuhi, seperti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menghambat aktivitas usaha dengan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan hak asasi.

3.5 Sub Indeks Infrastruktur

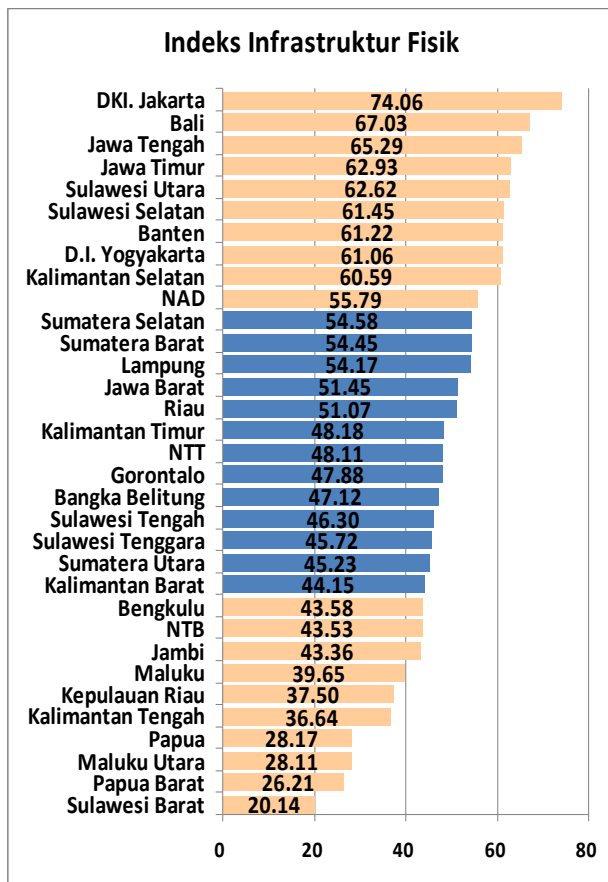
Variabel Penilaian:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Ketersediaan Infrastruktur○ Kualitas Infrastruktur |
|---|

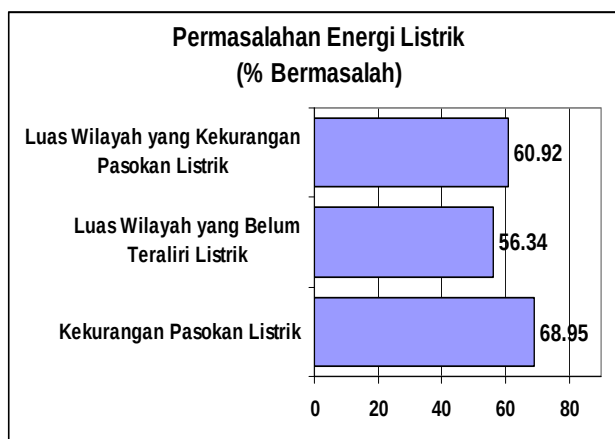
Penghitungan keseluruhan variabel dalam indikator infrastruktur menunjukkan sejumlah permasalahan yang harus segera diatasi. Persoalan infrastruktur tidak hanya dari sisi ketersediaan infrastruktur yang sudah cukup memadai, tetapi juga bagaimana kualitasnya. Mudah-mudahan akses melalui tersedianya jalan darat antar Provinsi terdekat merupakan faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah, apalagi didukung ketersediaan pelabuhan laut dan bandara udara. Berdasarkan persepsi pelaku usaha di daerah, diketahui masih banyak yang menilai negatif terhadap kualitas dan ketersediaan sarana transportasi darat.

Dilihat dari peringkat Sub Indeks Infrastruktur Fisik, terlihat bahwa daerah-daerah di Jawa dan Bali mendominasi peringkat teratas. Pada peringkat pertama DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan peringkat teratas untuk indikator infrastruktur, dan selanjutnya diikuti oleh Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Banten, DIY dan seterusnya. Sementara peringkat terbawah ada di daerah-

daerah luar Pulau Jawa, di mana tercatat Sulawesi Barat sebagai Provinsi dengan sub-indeks terendah untuk penilaian infrastruktur.

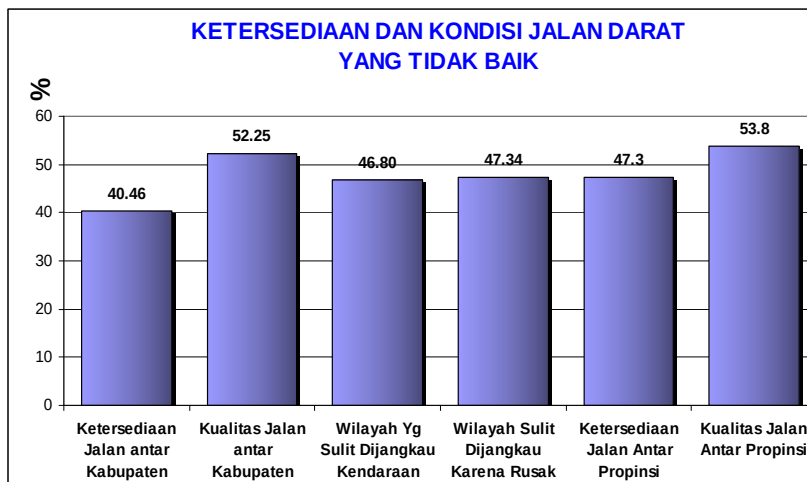


Dilihat dari kualitas sambungan listrik, pelaku usaha masih melihat belum memadai, seperti tingginya frekwensi pemadaman listrik. Terkait dengan ketersediaan energi listrik, secara Nasional 68.95% Pengusaha menilai ketersediaan listrik Kurang dan sangat Kurang. Bahkan di sejumlah daerah memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Sebagai contoh, pada tahun 2007 ketersediaan listrik di Kalbar 285.342 MW, dinilai oleh 73.53% Pengusaha di Kalbar masih kurang bahkan sangat kurang. Sebanyak 47% pengusaha menilai masih sangat luas wilayah yang belum terjangkau aliran listrik. Akibatnya 96.3% pelaku usaha di Kalbar, memasang Genset untuk mengantisipasi kekurangan pasokan listrik dan pemadaman listrik.



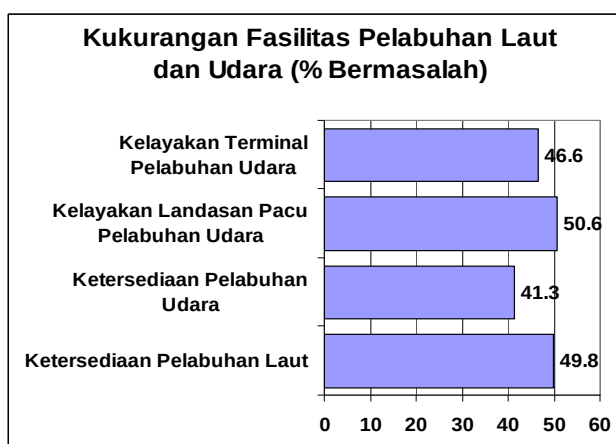
Untuk sarana komunikasi seperti sambungan telepon dan internet, masih terlihat banyak Provinsi yang desa-desanya belum terpasang sambungan telepon dan internet, atau terpasang dengan kualitas rendah.

Untuk infrastruktur jalan darat, berdasarkan data statistik infrastruktur dari Departemen PU, pada tahun 2007-2008 kondisi jalan darat di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Dari keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, hanya 56% diantaranya dengan kondisi mantap, dan sisanya rusak hingga rusak parah. Sedangkan untuk kondisi jalan propinsi sedikit lebih baik, yakni 64,15% dalam



kondisi mantap. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei kepada para pelaku usaha, dimana untuk jalan kabupaten 40.46% pelaku usaha menyatakan kurang, dan untuk jalan propinsi 47.3%

dinyatakan kurang juga. Aksesibilitas antar wilayah antar daerah dalam satu propinsi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kualitas jalan darat ini. Para pelaku usaha menyatakan masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan jalan darat karena masalah ketersediaan dan kualitas jalan yang tersedia.



Infrastruktur pelabuhan laut dan pelabuhan udara merupakan sarana lain yang dapat mempermudah mobilitas barang dan manusia antar propinsi. Dari survei ini diketahui sejumlah permasalahan terkait dengan kedua jenis infrastruktur ini. Untuk ketersediaan pelabuhan laut, ternyata 49.8% pelaku usaha

menyatakan masih kurang. Sementara untuk ketersediaan pelabuhan udara 41.3% pelaku usaha menyatakan kurang. Khusus untuk pelabuhan udara, dilihat dari

kualitas yang sudah ada juga masih terdapat persoalan, terutama dilihat dari kelayakan dan kenyamanan terminal penumpang, serta kelayakan landasan pacu. Sebanyak 50.6% pelaku usaha menyatakan landasan pacu beberapa pelabuhan udara yang saat ini ada ternyata tidak layak lagi. Demikian juga untuk kelayakan dan kenyamanan terminal penumpang, ternyata masih ada 46.6% pelaku usaha yang menyatakan kurang layak.

Persoalan yang terjadi terkait ketersediaan dan kualitas infrastruktur tidak terlepas dari manajemen infrastruktur di daerah. Walaupun 95% Provinsi menyatakan berkoordinasi dengan kab/kota dalam pengelolaan infrastruktur, namun 49% Provinsi menyatakan terjadi benturan/permasalahan dalam koordinasi dengan kab/kota dalam pengelolaan infrastruktur di daerah. Dalam pengadaan dan pengelolaan infrastruktur, sebanyak 33% Provinsi menyatakan terdapat kerjasama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya, namun 74% Provinsi menyatakan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur masih sangat rendah.

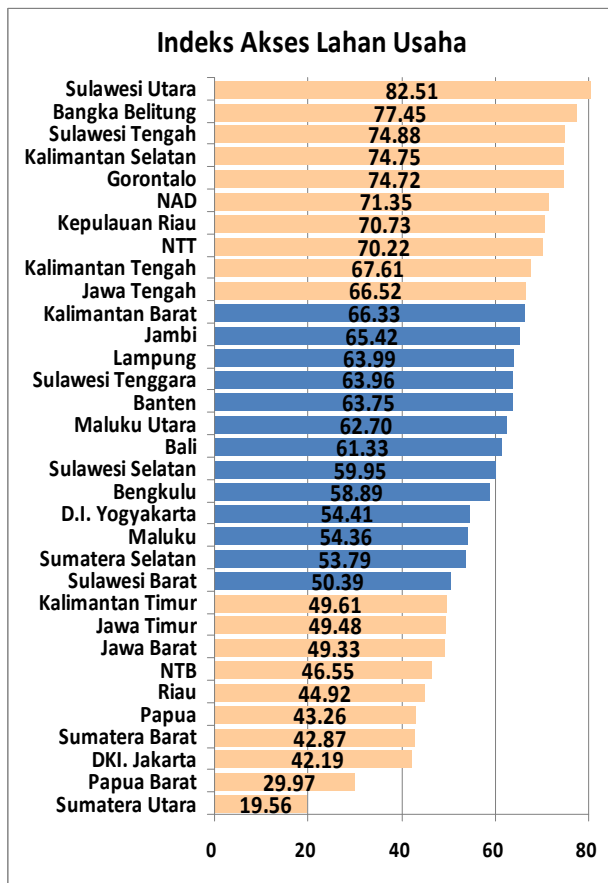
3.6 Sub Indeks Akses Lahan Usaha

Variabel Penilaian:

- Kemudahan Memperoleh Lahan Usaha
- Kepastian Status Kepemilikan Lahan Usaha
- Tingkat Hambatan Usaha Akibat Permasalahan Lahan

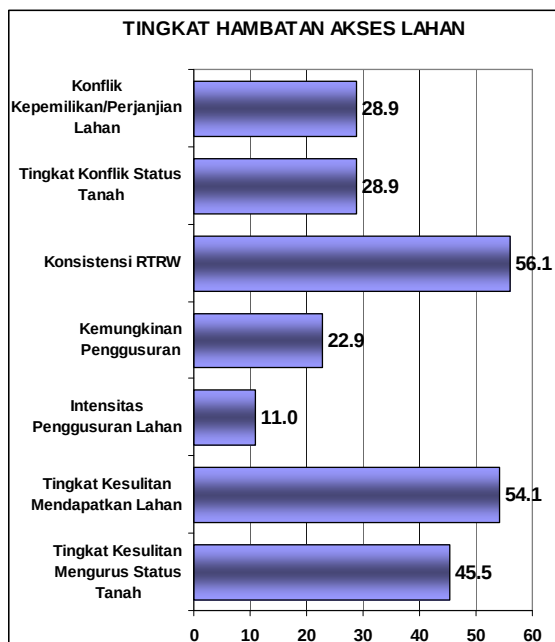
Dalam indikator akses lahan usaha, tingkat kemudahan memperoleh lahan merupakan salah satu kelemahan. Persepsi pelaku usaha akan harga tanah dan biaya mengurus status tanah tidak terlalu menjadi masalah. Sedangkan untuk urusan kepastian status kepemilikan lahan usaha masih dirasa kurang memadai, antara lain ditunjukkan oleh masih banyaknya masalah berkaitan dengan lahan usaha. Intensitas penggusuran lahan usaha, inkonsistensi peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah, dan permasalahan konflik baik terkait dengan status kepemilikan lahan maupun konflik perjanjian kerjasama penggunaan tanah.

Dari peringkat nilai Indek akses lahan usaha terlihat bahwa Sulawesi Utara berada pada peringkat pertama, disusul oleh Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Kalimantan



dan seterusnya. Yang menarik untuk kajian lebih lanjut adalah bahwa Provinsi yang berada di pulau-pulau besar dengan wilayah yang luas, di antaranya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat berada pada 5 peringkat terbawah. Paling tidak ada beberapa penjelasan mengenai sulitnya akses lahan di daerah-daerah tersebut. Pertama terkait dengan tanah ulayat, dan kedua adalah sebagian lahan sudah dikonsesikan kepada pelaku usaha dan belum dimanfaatkan, dan sebagian lagi karena seringnya terjadi sengketa karena ketidakjelasan status lahan.

Secara Nasional 54.1% Pengusaha merasa bahwa untuk mendapatkan lahan usaha sulit dan sangat sulit untuk mendapatkan lahan usaha. Bahkan di beberapa daerah di



Kalimantan, seperti Kalbar 79.41% pengusaha merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan lahan usaha. Kesulitan ini tidak hanya dari sisi ketersediaan, namun juga disebabkan tingginya tingkat hambatan terkait dengan akses lahan yang sangat tinggi (71% pelaku usaha). Dari sisi kesesuaian antara pemanfaatan lahan dan konsistensinya terhadap RTRW, ternyata 56.1% pelaku usaha menyatakan tidak konsisten. Hal ini

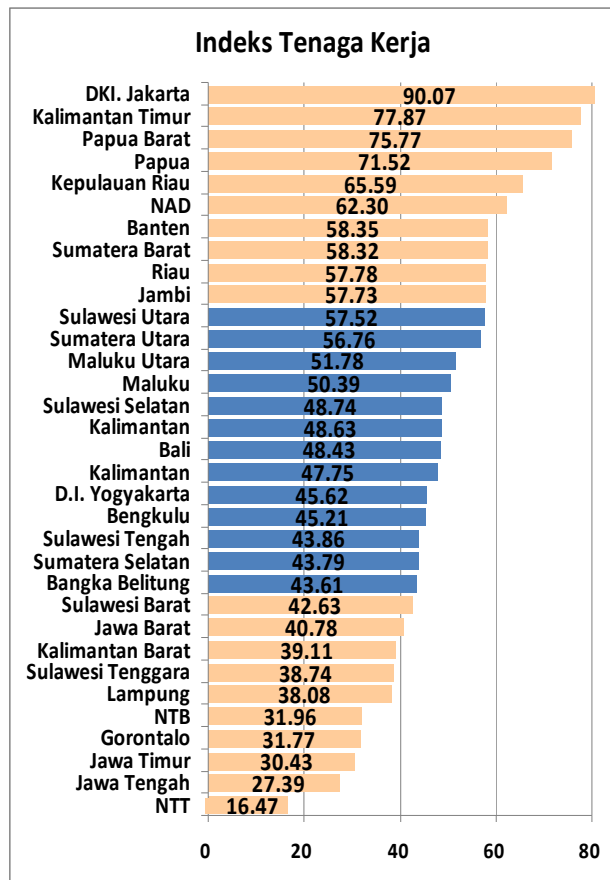
merupakan persoalan paling besar dibandingkan dengan permasalahan lain terkait dengan akses lahan, seperti intensitas penggusuran, konflik status tanah, dan konflik perjanjian kontrak kerjasama penggunaan lahan.

3.7 Sub Indeks Tenaga Kerja

Variabel Penilaian:

- Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kerja
- Biaya Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang merupakan unsur utama dalam setiap kegiatan usaha ternyata selama ini masih menjadi salah satu masalah serius. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang ada. Dari akumulasi setiap variabel dalam Sub Indeks Ketenagakerjaan yang meliputi ketersediaan, kualitas dan upah, Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi peringkat terbaik, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan terendah.



Hasil survei mendapatkan bahwa tenaga kerja yang ada masih kebanyakan tamatan SMA yakni rata-rata 33 propinsi tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA adalah 24% dari total tenaga kerja yang ada. Demikian pula dengan upah tenaga kerja masih menjadi kendala yang lain berkaitan dengan tenaga kerja.

Dari sisi upah tenaga kerja, untuk upah aktual secara rata-rata nasional untuk tahun 2007-2008 mencapai Rp.1.077.312,- per bulan. Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan upah aktual

tertinggi yakni mencapai Rp.1.739.950,- dan provinsi dengan upah aktual terendah adalah Rp.787.830,-. Sedangkan untuk upah resmi berdasarkan UMP, Papua merupakan daerah termahal yakni Rp.987.000,- dan terendah tetap diduduki oleh Jawa Tengah dan DIY yakni sebesar Rp.500.000,- per bulan.

Selain biaya tenaga kerja, aspek penting dalam ketenagakerjaan yang harus diperhatikan adalah kualitas tenaga kerja. Dari sisi kualitas tenaga kerja dilihat dari pendidikan, secara nasional proporsi tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap total tenaga kerja yang tersedia di daerah adalah sebesar 24.5%. DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat pendidikan tenaga kerja tertinggi yakni mencapai 49.8% tenaga kerjanya berpendidikan minimal SLTA, diikuti oleh Kepri (40.7%), DIY (35.9%), dan Kaltim (34.2%). Sedangkan daerah dengan tingkat pendidikan tenaga kerja terendah adalah NTT (14.75%), masih dibawah Papua (15.14%), Sulawesi Barat (15.36%), dan Lampung (15.80%).

Selanjutnya dilihat dari produktivitas per tenaga kerja, secara nasional setiap tenaga kerja secara rata-rata menyumbangkan Rp.7,2 juta perbulan terhadap PDB Sektor Industri. Daerah dengan tingkat produktivitas terendah adalah NTT yakni sebesar 0.22 juta rupiah perbulan per tenaga kerja, kemudian diikuti oleh NTB (0.57 juta), Gorontalo (0.99 juta), Bali (1.09 juta), dan Maluku (1.12 juta). Sedangkan daerah dengan tingkat produktivitas tertinggi diduduki oleh Riau dengan tingkat produktivitas sebesar 39.3 juta rupiah per tenaga kerja per bulan, dan diikuti oleh Papua Barat sebesar 23.6 juta, Babel (16.7 juta), Kepri dan DKI Jakarta masing-masing sama sebesar 13.6 juta per bulan per tenaga kerja.

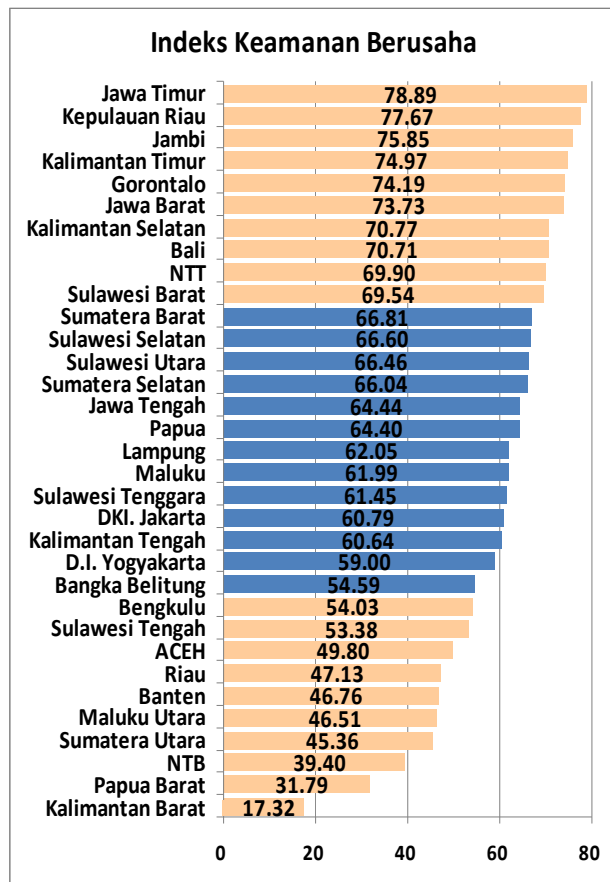
3.8 Kondisi Keamanan Usaha

Variabel Penilaian:

- Kondisi Keamanan Daerah
- Upaya Pemda Menjamin Keamanan Berusaha

Provinsi-Provinsi dengan kondisi daerahnya yang mengalami gejolak kemanan paling banyak adalah Papua Barat, Maluku Utara dan NAD. Seperti kita ketahui bahwa ketiga daerah ini sejauh ini belum sepenuhnya pulih dari kerawanan terutama

menyangkut konflik sosial. Dampak dari konflik tersebut sangat berpengaruh terhadap keamanan aktivitas usaha.

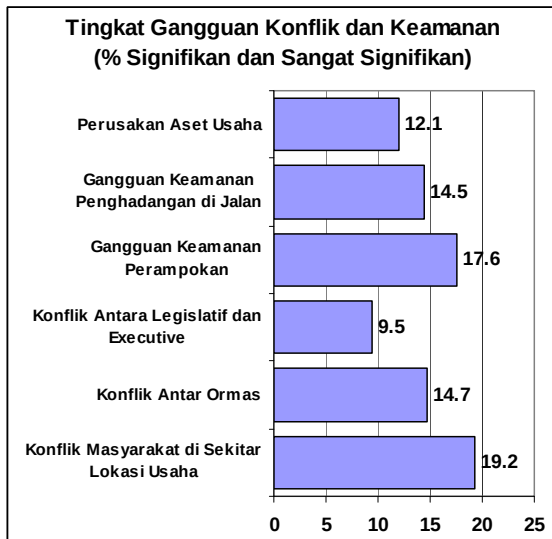


Secara keseluruhan nilai variabel-variabel dalam indikator keamanan kegiatan usaha menempatkan Provinsi Kalimantan Barat pada peringkat terbawah, kemudian di atasnya adalah Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Banten pada peringkat ke 6 dari bawah. Pada peringkat teratas adalah Jawa Timur yang dipandang oleh para pelaku usaha sebagai daerah yang paling aman untuk kegiatan usaha dengan nilai indeks keamanan berusaha mencapai 78.89, kemudian diikuti secara berurutan oleh Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan

Gorontalo serta Jawa Barat pada peringkat teratas.

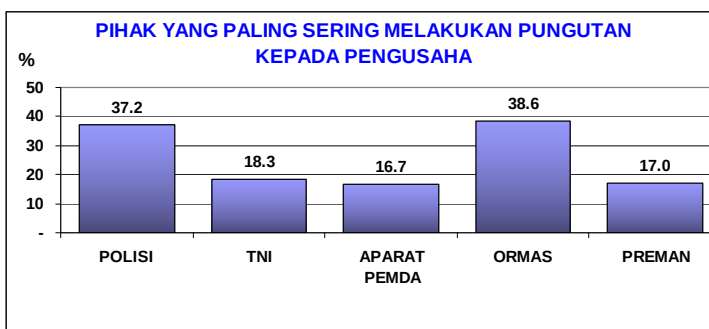
Dari survei ini diketahui bahwa secara nasional 53% pelaku usaha menyatakan bahwa pengaruh gangguan keamanan terhadap kegiatan usaha mereka besar dan sangat besar, dan sebanyak 50.5% pelaku usaha menyatakan pengaruh konflik sosial terhadap kegiatan usaha mereka adalah besar dan sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keamanan berusaha masih menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha di daerah.

Dilihat dari tingkat gangguan konflik dan keamanan terhadap aktivitas usaha, terlihat beberapa aspek yang menjadi sumber gangguan. Dari sisi konflik sosial politik, konflik masyarakat di sekitar lokasi usaha merupakan gangguan paling signifikan



dibandingkan dengan konflik antar ormas, atau konflik antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan dari sisi gangguan keamanan, perampokan terhadap aktivitas usaha merupakan hal yang paling signifikan yakni dinyatakan oleh 17.6% responden pelaku usaha, kemudian disusul dengan gangguan penghadangan di jalan (14.5%) dan perusakan aset usaha (12.1%).

Kondisi demikian semakin krusial karena kurangnya kapasitas pemerintah guna melokalisir dan mengatasi gangguan aktivitas usaha. Dari survei ini antisipasi dan penanganan gangguan keamanan dan konflik di daerah oleh pemerintah daerah dinilai cukup baik, terlihat dari hanya 28% pelaku usaha yang menyatakan bahwa upaya pemerintah propinsi dalam mengatasi dan mengantisipasi gangguan keamanan dinilai kurang baik dan tidak baik. Selanjutnya dilihat dari koordinasi antara pemprov dengan pihak kepolisian dalam mengatasi dan mengantisipasi konflik sosial, hanya sebesar 27.5% pelaku usaha menyatakan kurang baik dan tidak baik.



Namun demikian sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa mereka melakukan upaya-upaya sendiri dalam mendapatkan jaminan keamanan berusaha di daerah. Upaya yang mereka

lakukan adalah dengan membayar tambahan biaya keamanan kepada berbagai pihak. Organisasi kemasyarakatan dengan berbagai nama dan bentuknya, merupakan pihak yang paling sering memungut biaya keamanan kepada perusahaan-perusahaan yakni mencapai 38.6% dari pelaku usaha yang menyatakan

mereka membayar pungutan keamanan kepada ormas, kemudian disusul oleh aparat kepolisian (37.2%), dan terendah adalah kepada aparat pemda (16.7%).

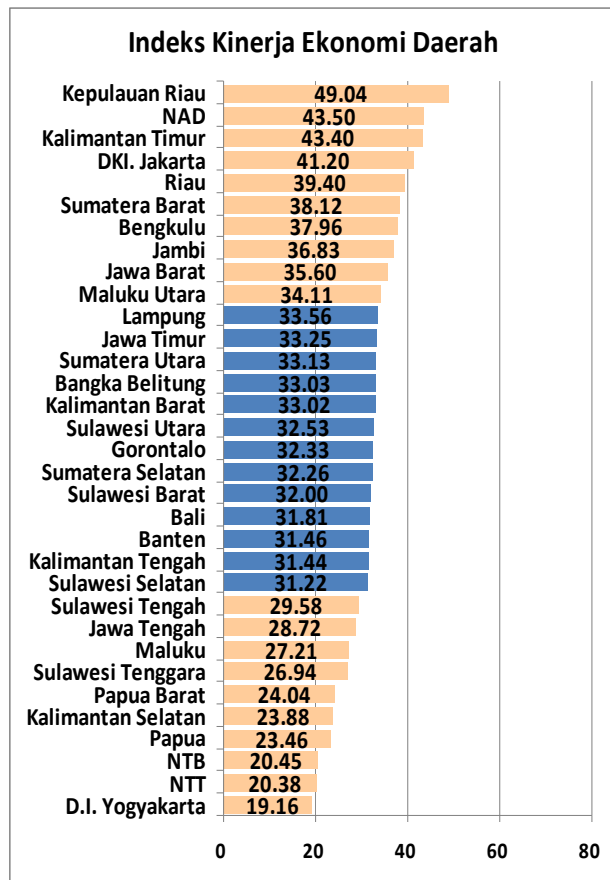
3.9 Kinerja Ekonomi Daerah

Variabel Penilaian:

- Pertumbuhan Investasi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Pertumbuhan Ekspor Impor
- Kesejahteraan dan Daya Beli Masyarakat
- Tingkat Kemahalan Investasi

Penghitungan keseluruhan variabel dalam indikator kinerja ekonomi daerah menunjukkan bahwa rata-rata Provinsi memiliki kinerja ekonomi yang kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata kinerja semua variabel penilaian yang berada pada skor relatif rendah. Nilai indeks keseluruhan variabel dalam hal kinerja ekonomi daerah memperlihatkan bahwa Kepulauan Riau menduduki posisi terbaik dalam peringkat 5 atas, diikuti selanjutnya NAD, Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan

Riau. Sementara peringkat 5 bawah berurutan dari posisi terendah adalah Provinsi D.I Yogyakarta, NTT, NTB Papua, dan Kalimantan Selatan.



Rata-rata pertumbuhan ekonomi 6.49%, dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kalimantan Timur (9.56%) dan terendah DIY (4.28%). Sektor yang paling besar mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor tersier, seperti perdagangan dan jasa-sasa yakni rata-rata sebesar 7.91% kemudian diikuti oleh sektor sekunder (industri dan bangunan) sebesar rata-rata 7.43%. Sementara sektor primer seperti pertanian,

pertambangan dan sebagainya memberikan kontribusi terkecil yakni sebesar 4.64%. Sedangkan untuk daya beli masyarakat yang tercermin dari PDRB Perkapita, secara rata-rata pada tahun 2007 adalah sebesar 14.5 juta. Namun disparitas pendapatan perkapita antar propinsi terlihat sangat mencolok. Kalimantan Timur merupakan daerah dengan tingkat PDRB Perkapita tertinggi yakni mencapai 67.6.9 Juta diikuti oleh Jakarta 55.9 Juta, sedangkan daerah terendah hanya mencapai 3 juta yaitu Maluku dan Maluku Utara.

Untuk kinerja perdagangan internasional, rata-rata pertumbuhan ekspor pada tahun 2007 mencapai 34%, dengan pertumbuhan ekspor tertinggi adalah Aceh (476%), dan pertumbuhan ekspor terendah adalah Maluku yang justru mengalami penurunan sebesar 47.7% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan impor lebih rendah dibandingkan ekspor yakni rata-rata sebesar 20.9%. Daerah dengan pertumbuhan impor tertinggi adalah Bengkulu yang mencapai 347%, dan terendah adalah Sulawesi Tenggara yang mengalami penurunan sebesar 99.7% dibandingkan tahun sebelumnya.

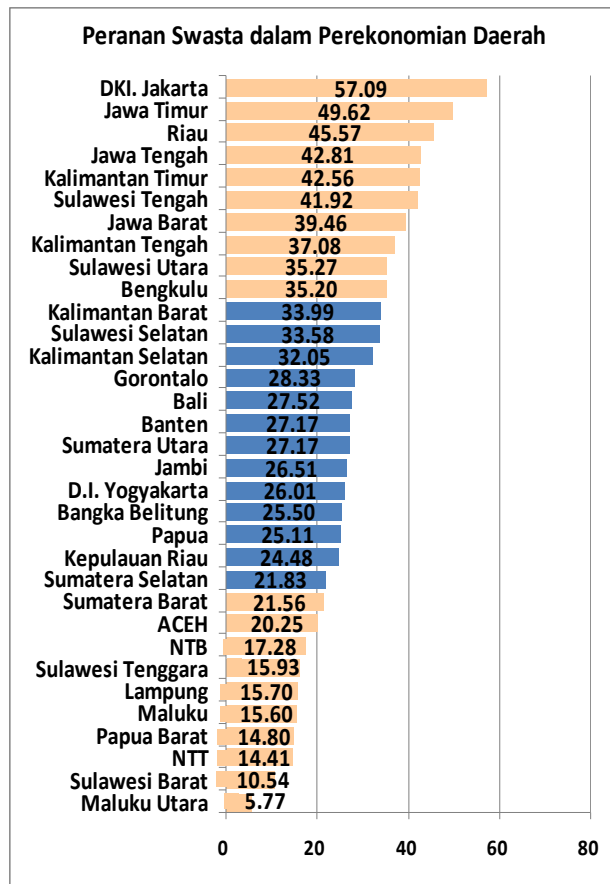
3.10 Sub Indeks Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah

Variabel Penilaian:
○ Ketersediaan Perbankan dan Akses Kredit ke Perbankan ○ Peran Swasta Dalam Keuangan Daerah ○ Peran Swasta Dalam Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Penghitungan keseluruhan variabel dalam indikator Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah menunjukkan bahwa 3,6% pelaku usaha menilai indikator ini tidak cukup besar berpengaruh dalam menciptakan iklim investasi daerah. Indikator ini merupakan indikator dengan bobot terkecil kedua setelah kinerja ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai indeks indikator yang paling rendah maupun nilai sub-indeks indikator.

Secara keseluruhan nilai variabel dalam indikator peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah terlihat dalam grafik berikut. Secara berurutan peringkat 5

terbaik dalam peringkat atas adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah dan Kaltim. Dan peringkat 5 bawah berurutan dari posisi terendah adalah Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, dan Maluku.



Berdasarkan pendapat responden dari pemerintah daerah (42%) menyatakan bahwa peran Swasta dalam keuangan daerah (PAD) daerah dinilai masih sangat kurang. Demikian juga dengan peran swasta dalam CSR, 52% responden pemerintah juga menilai peran dunia usaha dalam CSR (untuk masyarakat) masih sangat kurang. Kontribusi sektor swasta dalam perekonomian daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan perbankan sebagai sumber pendanaan kegiatan usaha yang ada di setiap provinsi. Berdasarkan pendapat para pelaku usaha,

ternyata 74.9% diantaranya menyatakan jumlah perbankan di daerah cukup dan sangat cukup sebagai lembaga intermediasi. Namun demikian dari sisi kemudahan mengakses kredit perbankan ternyata 37% pelaku usaha di daerah menyatakan sulit dan bahkan sangat sulit.

Selanjutnya kontribusi sektor swasta dalam penyerapan lapangan kerja selama tahun 2008 diketahui bahwa secara nasional rata-rata investasi swasta PMDN dari rencana sebanyak 86.891 tenaga kerja realisasinya mencapai 178.967 atau 206% dari rencana penyerapan tenaga kerja yang direncanakan. Penyerapan tenaga kerja sebesar 178.967 orang ini adalah sebesar 67.32% dari total pencari kerja di tahun

2008 yang mencapai 265.858 pencari kerja. Artinya sekitar 33% pencari kerja belum tertampung dalam lapangan kerja dari PMDN selama tahun 2008.

Bab IV

Penutup Kesimpulan dan Rekomendasi

Survei Iklim Invesatasi 33 Propinsi di Indonesia tahun 2008 merupakan upaya untuk melihat gambaran bagaimana pengelolaan investasi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada bagian sebelumnya telah diulas temuan-temuan penting mengenai pelaksanaan mengenai berbagai persoalan iklim investasi di tingkat provinsi selama tahun 2008 disertai indeks yang merupakan capaian setiap indikator penelitian. Temuan penting dari survei adalah banyaknya persoalan terkait dengan isu iklim investasi yang umumnya menjadi beban bagi kegiatan usaha. Berikut ini disampaikan kembali rangkuman beberapa hal penting dari hasil survei:

1. Pemerintah Provinsi harus terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi khususnya pada infrastruktur dan masalah tanah.

Infrastruktur menjadi kendala utama tampak dari sejumlah fakta. Jaminan pasokan listrik yang dapat diandalkan merupakan tanggung jawab nasional, pemerintah daerah, provinsi dan PLN. Perlu dirumuskan cara untuk memperbaiki ketersediaan listrik agar lebih dapat diandalkan dan dapat melayani seluruh wilayah tanah air. Pemda harus memberi lebih besar perhatian untuk pemeliharaan jalan tingkat provinsi, dan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayahnya dalam rangka pengelolaan infrastruktur jalan ini.

Kesulitan akses tanah dan ketidakpastian kepemilikan lahan merupakan masalah penting bagi pelaku usaha lokal, terbukti dengan banyaknya pelaku usaha menyatakan hal ini sebagai kendala yang paling penting. Hampir setengah dari perusahaan mengatakan bahwa memperoleh akses terhadap tanah adalah sulit dan menjamin bahwa akses dengan mendapatkan sertifikat tanah adalah sebuah proses panjang. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu bekerja sama untuk mencari cara yang efektif untuk mengidentifikasi, memfasilitasi dan mengamankan akses terhadap tanah untuk pelaku usaha.

Isu-isu terkait dengan perizinan dan biaya transaksi yang selama ini menjadi pembicaraan banyak kalangan ternyata bukanlah kendala utama terhadap aktivitas usaha. Sebagian besar pelaku usaha merasa tidak terganggu oleh prosedur perizinan, pajak dan retribusi. Dengan demikian fakta bahwa prosedur perizinan tidak muncul sebagai beban perusahaan adalah sebagian indikasi terjadinya kegagalan daripada keberhasilan - banyak perusahaan yang tidak punya izin resmi padahal seharusnya wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha.

Aspek biaya, waktu dan prosedur untuk mendapatkan izin dianggap sebagai gangguan oleh pelaku usaha, tetapi bukan menjadi kendala utama untuk perkembangan usaha mereka. Sebagian besar perusahaan yang memiliki izin juga mengatakan bahwa prosedur perizinan dan retribusi ternyata juga tidak mengganggu mereka.

Keamanan berusaha dan konflik sosial di sekitar lokasi usaha dipandang sebagai kendala oleh pelaku usaha. Meskipun secara rata-rata hanya sedikit kejadian kejahatan di daerah-daerah, dan namun masalah keamanan merupakan problem yang sangat mengganggu aktivitas usaha. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengatasi berbagai gangguan keamanan dan konflik yang terjadi di daerah, guna memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha. Tidak sedikit pelaku usaha yang berusaha sendiri dalam mengamankan kegiatan usaha mereka dengan cara membayar biaya keamanan tambahan kepada berbagai pihak. Tentunya hal ini merupakan tambahan biaya bagi mereka yang dapat menekan daya saing.

2. Pemerintah Daerah perlu lebih fokus untuk membuat kebijakan yang mendukung usaha.

Terdapat kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha dan kapasitas lokal dan pendekatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemda melakukan upaya substansial untuk menyediakan layanan yang efektif, dengan berkonsultasi dengan pelaku usaha, memelihara infrastruktur yang lebih baik, dan menyediakan program pengembangan pelaku usaha yang efektif. Tapi sayangnya, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Perusahaan-perusahaan percaya bahwa

ada Forum Komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dan tetapi kurang dari 20% yang mengetahui tentang program pengembangan usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3. Perbedaan yang signifikan dalam iklim investasi daerah diantara daerah-daerah di Indonesia menunjukkan bahwa perlu dilakukan perbaikan secara substansial.

Perbedaan besar ini tidak hanya disebabkan oleh faktor geografi, tetapi terlihat karena ada beberapa pemerintah daerah yang telah lebih efektif di menerapkan reformasi dan perbaikan layanan publik. Kenyataan bahwa perbedaan kinerja yang besar antar propinsi tidak disebabkan oleh faktor geografi, menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk perbaikan dalam kualitas tata pemerintahan lokal. Hal ini terindikasi dari kenyataan adanya daerah-daerah yang mencapai indeks yang sangat tinggi dan daerah dengan indeks yang sangat rendah. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bertanggung jawab agar berupaya mencapai standar yang realistis sebagaimana yang maksimal bisa dicapai oleh kabupaten suatu daerah.

Untuk penilaian kinerja daerah propinsi harus menggunakan jenis "ukuran kompetisi" yang obyektif. Selanjutnya dari hasil penilaian ini dapat digunakan untuk memberikan insentif bagi provinsi untuk saling belajar satu sama lain dalam meningkatkan kinerja mereka. Indeks Iklim Invesasi Provinsi juga dapat diperluas untuk banyak aspek pemerintahan dan kemudian digunakan untuk membuat kebijakan dan secara komprehensif mengukur kualitas tata kelola ekonomi daerah secara keseluruhan.

LAMPIRAN:
Daftar Indikator Penilaian

DAFTAR INDIKATOR DAN VARIABEL PEMBENTUK INDEKS IKLIM INVESTASI PROPINSI

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
I KELEMBAGAAN PENANAMAN MODAL			
1	Kedudukan Institusi Penanaman Modal di Daerah	Mengukur institusi pelaksana Penanaman Modal: apakah berbentuk satu lembaga tersendiri (BKPM) atau digabung dengan fungsi/ urusan lain.	1 Bentuk dan Fungsi Kelembagaan BKPM (atau nama lain) yg khusus melaksanakan fungsi Penanaman Modal
			2 Level Eselonisasi
2	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal antara IPMP dan SKPD Terkait	Mengukur efektifitas koordinasi kebijakan dengan dengan Instansi Pemda propinsi lainnya atau dgn instansi vertikal yang memiliki fungsi terkait (Bappeda untuk perencanaan pembangunan, Dinas PU untuk RTRW, BPN untuk pertanian, dll).	3 Frekuensi rapat koordinasi BKPM dg Bappeda/Dinas PU/BPN, dll (Keberadaan Koordinasi IPMP dg SKPD, serta Frekwensi Koordinasi yang dilakukan).
			4 Efektivitas koordinasi BKPM dg Bappeda/Dinas PU/BPN dalam urusan perijinan atau penanganan masalah pelaku usaha (Optimalisasi Koordinasi; Kendala Koordinasi; dan Efektivitas Koordinasi IPMP dg SKPD)
3	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pembangunan Daerah antara Pemprov dan Kabupaten/Kota	Mengukur efektifitas upaya pemprov dalam melibatkan pemda kab/kota dalam penyusunan kebijakan prov yang terkait dengan penanaman modal.	5 Partisipasi kab/kota dalam penyusunan rencana program penanaman modal provinsi (Pelibatan Kab/Kota dalam Perencanaan Penanaman Modal; Tingkat Keterlibatan Kab/Kota dalam Perencanaan Program Penanaman Modal; dan Efektivitas Pelibatan Kab/Kota).
			6 Upaya Pemprov dalam mendorong kerjasama antar daerah Kab/kota utk promosi investasi (Mendorong Kerjasama antar Daerah kab/kota di wilayahnya dalam rangka promosi investasi; dan Efektivitas dari Upaya Mendorong Kerjasama antar daerah kab/kota di wilayahnya dalam rangka promosi investasi Daerah).
			7 Pelibatan Kab/kota dalam promosi investasi yg diadakan oleh Pemprov (Pelibatan Kab/Kota dalam promosi investasi yang diadakan oleh Pemprov; Efektivitas pelibatan kab/kota dalam kegiatan promosi investasi yang diadakan pemprov; Pelibatan Kab/Kota dalam promosi Investasi ke Luar Negeri).
			8 Pelibatan kab/kota dalam musrenbang (Pelibatan Kab/Kota dalam Musrenbang; tingkat Partisipasi kab/kota dalam Musrenbang; Tingkat Akomodir usulan kab/kota dalam program pembangunan daerah propinsi; dan Mekanisme menjangir usulan kab/kota selain musrenbang).
			9 Pelibatan pemda Kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW (Pelibatan Kab/Kota dalam penyusunan RTRW; Tingkat Partisipasi Kab/kota dalam penyusunan RTRW; Efektivitas pelibatan kab/kota dalam penyusunan RTRW)

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
4	Upaya Pemda Memfasilitasi Proses Persetujuan Investasi	Mengukur efektivitas Pemda untuk memfasilitasi terwujudnya proses persetujuan investasi menjadi <i>actual</i> (realisasi).	10 Kelancaran penyelesaian perijinan-perijinan tingkat propinsi pasca-persetujuan menjadi realisasi investasi.
			11 Koordinasi atas pemda Kab/Kota utk mempercepat penyelesaian perijinan-perijinan tingkat Kab/Kota pasca-persetujuan menjadi realisasi investasi
			12 Konsistensi (regularitas) dalam mengirim laporan ke Pemerintah Pusat mengykt proses pra-realisasi investasi guna mendapat pembinaan dan bantuan fasilitas lebih lanjut
5	Pengendalian Penanaman Modal	Mengukur kemampuan pemprov dalam memetakan potensi investasi serta kesesuaian pengembangan ekonomi berdasarkan data potensi yang dimiliki oleh pemprov.	13 Data Pemetaan potensi ekonomi investasi (Data pemetaan potensi investasi; Data peta investasi; dan Keberadaan data potensi investasi).
			14 Keberadaan data-base investor potensial
			15 Pengetahuan pemprov terhadap potensi investasi daerah
			16 Kesesuaian prioritas pengembangan ekonomi daerah dg potensi daerah menurut Pelaku Usaha (Kesesuaian program pembangunan ekonomi oleh pemprov dengan potensi investasi; Kesesuaian Prioritas Pembangunan; dan Kesesuaian prioritas pembangunan dengan potensi ekonomi dengan potensi yang ada).
II. PROMOSI INVESTASI DAERAH			
1	Informasi Potensi Investasi	Mengukur ketersediaan dan kualitas data informasi potensi investasi daerah yang dibutuhkan oleh investor.	17 Keberadaan dan ketersediaan data potensi investasi di web-site daerah
			18 Kelengkapan informasi informasi investasi daerah di web-site (potensi, perijinan, link kab/kota/pemerintah, dll.)
			19 Kemutakhiran (up-date) data potensi investasi daerah di web-site Pemprov
2	Program Promosi Investasi	Melihat upaya-upaya pemda dalam melakukan promosi investasi daerah.	20 Alokasi dana oleh Pemprov utk promosi investasi
			21 Keberadaan kegiatan promosi investasi ke luar daerah (Promosi investasi di tingkat nasional; dan Keberadaan kegiatan promosi investasi ke luar daerah).
			22 Keberadaan website promosi investasi (Situs khusus investasi selain situs pemda; dan Keberadaan website promosi investasi daerah).
			23 Kerjasama dg propinsi lain dalam wadah institusi promosi investasi daerah (Kerjasama promosi investasi dengan propinsi lain; dan Kerjasama dengan propinsi lain dalam wadah institusi promosi investasi daerah).
			24 Promosi investasi Pemprov di Luar Negeri (Keberadaan kegiatan promosi investasi ke LN; Intensitas Promosi investasi ke LN per tahun; dan Intensitas Promosi investasi ke LN dalam satu tahun terakhir).
			25 Branding Daerah (Regional Branding) (Keberadaan Branding daerah; Kualitas upaya program-program yang mendukung branding daerah; dan optimalisasi program pendukung regional branding).

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
3	Efektifitas dan Efisiensi Program Promosi Investasi	Melihat efisiensi dan optimalisasi promosi investasi serta efektivitas dari program-program promosi investasi yang dilakukan oleh Pemprov.	26 Keberadaan perwakilan promosi investasi Pemprov di Luar Negeri (Membuat kantor perwakilan promosi investasi ke Luar Negeri).
			27 Kerjasama investasi dg institusi Pemerintah (Kota) di Luar Negeri (G to G) - sister city, dll
			28 Kerjasama investasi dg Institusi Bisnis di Luar Negeri (G to B)
			29 Kerjasama investasi dg dunia bisnis di dalam negeri (G to B)
			30 Efektifitas Keberadaan kegiatan promosi investasi ke luar daerah
			31 Efektifitas Keberadaan website promosi investasi
			32 Efektifitas Kerjasama dg propinsi lain dalam wadah institusi promosi investasi daerah
			33 Efektifitas pemanfaatan perwakilan pempus di Luar negeri utk promosi investasi
			34 Efektifitas Promosi Investasi ke Luar Negeri
			35 Efektifitas branding daerah (Kesesuaian branding dengan kondisi daerah; Tingkat pemahaman masyarakat terhadap branding daerah; Efektifitas branding daerah).
			36 Efektifitas promosi investasi secara umum
III. UPAYA PELAYANAN TERHADAP DUNIA USAHA			
III.1 Komitmen Pemprov untuk Pengembangan Dunia Usaha			
1	Interaksi antara Pemprov dengan Pelaku Usaha	Mengukur efektivitas forum komunikasi antara pemrov dengan dunia usaha.	37 Adanya forum komunikasi antara pelaku usaha dengan pemprov
			38 Pelibatan Dunia Usaha dalam Penyusunan rencana program investasi
			39 Frekwensi pertemuan forum komunikasi yang membahas kebijakan pemerintah daerah
			40 Efektifitas forum komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah provinsi
2	Insentif dan Bantuan Pemprov kepada Pelaku Usaha	Mengukur besarnya insentif dan bantuan pemprov terhadap pelaku usaha di daerah.	41 Insentif investasi (baik untuk sektor industri tertentu, maupun untuk tempat/lokasi usaha tertentu)
			42 Besarnya biaya program pelatihan bagi pelaku usaha (pelatihan manajemen, produk knowledge, pemasaran produk) yang dibiayai pemda
3	Program Pengembangan Dunia Usaha	Mengukur efektivitas program riil yang dilakukan Pemda untuk investor dan manfaatnya bagi pengembangan usaha	43 Keberadaan program pengembangan usaha (kredit, BDS, dll)
			44 Bantuan kredit kepada pelaku usaha dari APBD
			45 Manfaat Program Pembangunan Dunia Usaha
			46 Efektivitas program pengembangan usaha bagi kebutuhan pelaku usaha
III.2 Komitmen Pemprov dalam Pengelolaan Prasarana Usaha			
1	Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan	Mengukur koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur jalan darat untuk kelancaran aktivitas usaha.	47 Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan
			48 Adanya masalah dalam pengelolaan infrastruktur antara pemprov dan Kab/kota
2	Komitmen Pemprov dalam pengadaan/pengelolaan Jalan	Mengukur seberapa besar komitmen pemerintah propinsi	49 Rasio Belanja Lansung thd Total Belanja APBD

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
	Darat	dalam menyediakan dan mengelola jalan darat untuk	50 Waktu Perbaikan Jalan Propinsi (dari Kerusakan)
3	Respon Pemprov terhadap Kerusakan Jalan Darat	Mengukur responsibilitas pemprov dalam menanggapi pengaduan dunia usaha atas kerusakan jalan provinsi.	51 Waktu Perbaikan Listrik
4	Komitmen Pemprov dalam pengadaan/pengelolaan Pelabuhan Laut	Mengukur seberapa besar komitmen pemprov dalam menyediakan dan mengelola pelabuhan laut sebagai sarana pengangkutan komoditi dari dan ke suatu provinsi.	52 Waktu Perbaikan Gangguan Pelabuhan
5	Respon Pemprov terhadap Gangguan Listrik	Mengukur responsibilitas pemerintah propinsi dalam menangani pengaduan dunia usaha atas kualitas	53 Waktu utk Melakukan Perbaikan Kerusakan Telepon 54 Persepsi Kecepatan Perbaikan Kerusakan Telepon
III.3 Biaya dalam Pelayanan terhadap Dunia Usaha			
1	Biaya-biaya Transaksi Usaha/Efisiensi pungutan di Daerah	Mengukur besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha yang dalam menjalankan aktifitas usaha di daerah, yang terdiri dari biaya formal (resmi oleh pemprov) maupun biaya tidak resmi diluar pemda.	55 Besarnya Pajak dan Retribusi yang dibayar Pelaku Usaha kepada Pemprov (Pungutan Formal/Resmi) 56 Besarnya Pungutan yang dibayarkan Pelaku usaha kepada Preman, Polisi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Aparat Keamanan (Pungutan Informal/Tidak Resmi)
2	Pengaruh Berbagai Pungutan Daerah (Donasi/Sumbangan ke Pemda, Masyarakat, dan Biaya Transaksi)		57 Donasi/Sumbangan Ke Pemerintah Propinsi 58 Donasi ke Masyarakat (Selain CSR) 59 Keberadaan Pungutan Polisi 60 Keberadaan Pungutan TNI 61 Keberadaan Pungutan Aparat Pemda 62 Keberadaan Pungutan ORMAS 63 Keberadaan Pungutan Preman
3	Biaya dan Waktu Pelayanan Perizinan untuk Memulai Usaha	Mengukur pengaruh dari berbagai pungutan daerah terhadap hambatan kegiatan usaha di daerah. Mengukur besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha untuk memulai Usaha di Daerah.	64 Pengaruh Donasi/Sumbangan ke Pemerintah Propinsi 65 Pengaruh Donasi/Sumbangan ke Masyarakat 66 Pengaruh Biaya Transaksi 67 Besarnya Biaya Perizinan Usaha yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi 68 Penyimpangan (Tambahan) Biaya Perizinan (Pungli dalam Perizinan Usaha) 69 Waktu yang diperlukan untuk Mengurus Perizinan Usaha
4	Transparansi Sistem Pelayanan Perizinan Usaha di Propinsi	Mengukur tingkat kejelasan dan transparansi Sistem perizinan di BKPM (IPMP) seperti kejelasan informasi waktu, biaya, dan prosedur pelayanan.	70 Penyimpangan Waktu untuk Memperoleh Izin Usaha 71 Transparansi Sistem perizinan di BKPM (IPMP) seperti kejelasan informasi waktu, biaya, dan prosedur pelayanan.
5	Hambatan Investasi dari Perda (Kualitas Peraturan Daerah)	Mengukur tingkat hambatan yang berasal dari perda kab/kota terhadap aktivitas penanaman modal yang ada di provinsi.	72 Kejelasan Informasi Waktu 73 Kejelasan Informasi Biaya 74 Kejelasan Informasi Prosedur 75 Rasio perda kab/kota yang direkomendasikan dibatalkan Depkeu dengan jumlah perda yang dianalisis Depkeu
IV. INFRASTRUKTUR			
IV.1 Ketersediaan Infrastruktur			
1	Ketersediaan Jalan	Mengukur ketersediaan jalan darat di wilayah propinsi	76 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Daratan.

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
		yang menghubungkan daerah-daerah di dalam propinsi maupun dengan daerah lain di luar propinsi.	77 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor (Rasio Pertumbuhan Panjang Jalan terhadap Pertumbuhan Kendaraan Bermotor) 78 Persentase Desa yang dapat diakses dengan Kendaraan Roda Empat 79 Keterhubungan Antar Daerah di dalam wilayah suatu propinsi. (Ketersediaan Jalan antar kab/kota dalam satu propinsi; dan Luas wilayah yang sulit dilalui kendaraan roda empat). 80 Keterhubungan suatu Provinsi dengan Provinsi Lain (Ketersediaan Jalan yg Menghubungkan dg Propinsi Lain). 81 Jumlah Pelabuhan Laut dan Tipe Pelabuhan Laut. 82 Persepsi Pelaku Usaha tentang Kelayakan (Kecukupan) Pelabuhan Laut untuk Aktivitas Ekonomi Daerah. 83 Persepsi pelaku usaha terhadap ketersediaan airport. 84 Persepsi pelaku usaha terhadap kelayakan landasan pacu airport yang tersedia di daerah. 85 Persepsi pelaku usaha terhadap kelayakan terminal airport. 86 Persentase desa tanpa sambungan telepon. 87 Persentase desa dengan sinyal lemah dan tidak ada sinyal untuk handphone. 88 Prosentase Wilayah yang terjangkau Jaringan Oprator Telepon Seluler. 89 Ketersediaan provider internet. 90 Persentase desa belum teraliri listrik 91 Luas Wilayah yang belum teraliri listrik. 92 Persepsi Pelaku Usaha terhadap kecukupan energi listrik di daerah.
2	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Mengukur ketersediaan (kecukupan) pelabuhan laut sebagai sarana untuk pengangkutan barang dari suatu propinsi ke propinsi lain.	
3	Ketersediaan Pelabuhan Udara	Mengukur ketersediaan dan kecukupan sarana transportasi udara yang memudahkan untuk menjangkau suatu daerah propinsi ke propinsi lain (kemudahan menjangkau suatu propinsi dari luar daerah dan perjalanan ke luar daerah melalui pelabuhan udara).	
4	Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpo dan Internet.	Mengukur ketersediaan sarana komunikasi di suatu daerah propinsi.	
5	Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik	Mengukur ketersediaan jaringan listrik sebagai sumber energi bagi kegiatan produksi (dan aktivitas usaha) di suatu daerah propinsi.	
IV.2	Kualitas Infrastruktur		
1	Kualitas Jalan Darat	Mengukur kualitas jalan darat di propinsi, untuk melakukan pergerakan baik antar wilayah di dalam propinsi, maupun pergerakan barang dan manusia ke luar propinsi yang disebabkan oleh kualitas jalan darat yang tersedia di suatu propinsi.	93 Rasio Panjang Jalan Berkualitas Baik (Mantap) dengan Total Panjang Jalan Provinsi 94 Kemudahan berhubungan (mobilitas) aktifitas ekonomi antar daerah dalam suatu propinsi (pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu propinsi). 95 Kemudahan mobilitas ekonomi suatu propinsi dengan propinsi tetangga (pusat-pusat pertumbuhan ekonomi) 96 Volume Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Laut Perbulan per minggu 97 Rata-rata aktivitas bongkar muat barang per minggu. 98 Persepsi Pelaku Usaha tentang ketersediaan infrastruktur Pelabuhan untuk mengangkut barang (keluar masuk) suatu propinsi (kapasitas pelabuhan). 99 Kelancaran penerbangan dilihat dari jumlah Rata-rata Penerbangan (jadwal penerbangan) Pesawat Udara Perminggu.
2	Kelancaran/Kemudahan Transportasi Laut	Mengukur kemudahan aktivitas bisnis dalam melakukan pengangkutan barang dari dan ke daerah. Semakin besar dan sering kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di suatu daerah, maka semakin mudah dan lancar mobilitas barang dari dan ke daerah tersebut.	
3	Kelancaran/Kemudahan Transportasi Udara	Mengukur kemudahan mobilitas manusia dari luar propinsi atau dari suatu propinsi ke luar daerahnya. Semakin sering jadwal penerbangan dan jumlah penumpang yang keluar	

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
		masuk suatu daerah dengan transportasi udara, menunjukkan semakin mudah mobilitas manusia (daerah tersebut mudah diakses orang dari luar daerah).	100 Kelancaran penerbangan dilihat dari banyaknya maskapai penerbangan yang melayani rute Airport di suatu Provinsi.
4	Kualitas Sambungan Telpon dan Internet	Mengukur kemudahan melakukan komunikasi melalui telepon di daerah.	101 Persepsi Pelaku Usaha tentang Kemudahan melakukan perjalanan (keluar masuk) daerah suatu propinsi.
5	Kualitas Suplai Listrik	Mengukur kualitas sambungan listrik di daerah.	102 Rata-rata intensitas Gangguan Telepon Perbulan.
V.	AKSES LAHAN USAHA	Kemudahan Memperoleh Lahan Usaha	103 Kecepatan akses internet.
			104 Rata-rata Intensitas Gangguan Listrik Perbulan.
			105 Waktu yg diperlukan utk Mengurus Status (Registrasi) Tanah
			106 Biaya utk Mengurus Status Tanah
			107 Persepsi Pelaku Usaha ttg Kemudahan Mengurus Status Tanah
2	Kepastian Status Kepemilikan Lahan Usaha	Mengukur Kepastian Status Kepemilikan Lahan Usaha.	108 Persepsi Pelaku Usaha ttg Ketersediaan Lahan Usaha
			109 Persepsi Pelaku Usaha ttg Harga Tanah di Daerah (daerah perkotaan dan pedesaan)
			110 Intensitas Pengurusan Lahan Usaha
			111 Konsistensi Perutukan Lahan Usaha di Daerah (Konsistensi peruntukan lahan usaha dengan RTRW; dan kemungkinan Pengurusan Lahan Usaha untuk Kepentingan Pemerintah daerah).
			112 Intensitas Konflik Status Kepemilikan Lahan Usaha di Daerah (Intensitas konflik status kepemilikan lahan usaha; dan Intensitas konflik perjanjian kerjasama penggunaan lahan).
3	Tingkat Hambatan Usaha Akibat Permasalahan Lahan	Mengukur tingkat hambatan usaha yang diakibatkan oleh permasalahan akses lahan.	113 Tingkat Hambatan Usaha Akibat Permasalahan Lahan
VI. TENAGA KERJA			
1	Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kerja	Mengukur ketersediaan tenaga kerja di daerah yang terdidik.	114 Ketersediaan Tenaga Kerja Terdidik (Persentase tenaga kerja pendusuk usia kerja berpendidikan minimal SLTA).
		Mengukur produktivitas tenaga kerja di daerah.	115 Kualitas/Produktivitas Tenaga Kerja (Rasio UMP terhadap Produktivitas = PDRB Sektor Industri dibagi jumlah Tenaga kerja sektor industri).
		Mengukur besarnya upah tenaga kerja di daerah.	116 Rata-rata Upah Actual Tenaga Kerja
2	Biaya Tenaga Kerja		117 Biaya Resmi Tenaga Kerja (UMP Tahun 2008)
VII. KONDISI KEAMANAN KEGIATAN USAHA DI DAERAH			
1	Konflik Lokal yang menghambat aktivitas usaha.	Mengukur tingkat gangguan konflik terhadap aktivitas usaha.	118 Konflik masyarakat di sekitar lokasi usaha.
			119 Konflik antar ormas.
			120 Konflik antara legislatif dengan eksekutif.
2	Gangguan Keamanan yg ditimbulkan oleh Keberadaan kelompok masyarakat (preman dll)	Mengukur tingkat gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh masyarakat disekitar kegiatan usaha.	121 Pengaruh konflik sosial terhadap kegiatan usaha.
			122 Gangguan keamanan dari Perampokan
			123 Gangguan keamanan dari penghadangan di jalan.
			124 Perusakan aset usaha

FAKTOR DAN INDIKATOR		KETERANGAN	VARIABEL
			125 Pengaruh gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha.
3	Upaya Pemda Menjamin Keamanan Berusaha	Mengukur tingkat koordinasi Pemda dengan aparat keamanan dalam menangani konflik/ gangguan yang ada.	126 Tingkat koordinasi pemda dg aparat keamanan utk Penanganan Konflik/Gangguan 127 Upaya-upaya Pemprov dlm Mengantisipasi Gangguan keamanan di Daerah
VIII. KINERJA EKONOMI DAERAH			
1	Pertumbuhan Investasi di Daerah	Mengukur perkembangan peranan dunia usaha dalam mengerakkan ekonomi daerah.	128 Pertumbuhan jml Proyek Investasi (Pertumbuhan jumlah proyek PMDN; dan Pertumbuhan jumlah Proyek PMA). 129 Pertumbuhan Nilai Investasi (Pertumbuhan nilai investasi PMDN; dan Pertumbuhan nilai investasi PMA).
2	Pertumbuhan Ekonomi	Mengukur proyeksi/Prospek ekonomi kegiatan usaha di daerah.	130 Pertumbuhan Sektor Primer Non Migas 131 Pertumbuhan Sektor Sekunder Non Migas 132 Pertumbuhan Sektor Tersier
3	Pertumbuhan Export - Import	Mengukur prospek/Proyeksi kegiatan perdagangan antar wilayah di daerah.	133 Pertumbuhan Export Non Migas 134 Pertumbuhan Import Non Migas
4	Kesejahteraan dan Daya Beli Masyarakat	Mengukur tingkat kesejahteraan Masyarakat dan kemampuan pasar (daya beli masyarakat) di daerah.	135 Score Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
5	Tingkat Kemahalan Investasi	Mengukur tingkat kemahalan melakukan investasi di daerah yang ditimbulkan oleh tingkat kemahalan daerah dari aspek ekonomi, seperti inflasi daerah, standar hidup.	136 Daya Beli Masyarakat / PDRB Perkapita 137 Tingkat Inflasi Provinsi 2007 138 Indeks kemahalan Konstruksi Provinsi (IKK) 139 Rata-rata Indeks Harga Konsumen Provinsi (IHK)
IX. PERANAN DUNIA USAHA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH			
1	Kontribusi & Keterlibatan Sektor Swasta dlm pembangunan Infrastruktur di Daerah	Mengukur seberapa besar proyek-proyek pembiayaan swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah, serta seberapa besar pembangunan infrastruktur di daerah dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dan daerah dalam menyediakan permodalan usaha di daerah, serta mengukur kemudahan masyarakat (dunia usaha) untuk mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lain yang tersedia di daerah.	140 Keberadaan proyek pembangunan infrastruktur yg dibiayai oleh swasta 141 Tingkat partisipasi Swasta dlm pembangunan infrastruktur
2	Daya Dukung Lembaga Perbankan & Lembaga Keuangan Non Bank	Mengukur daya dukung lembaga keuangan perbankan di daerah dalam menyediakan permodalan usaha di daerah, serta mengukur kemudahan masyarakat (dunia usaha) untuk mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lain yang tersedia di daerah.	142 Rasio Kredit Perbankan utk UKM thd Total Kredit yg Disalurkan Perbankan 143 Persepsi Pelaku Usaha thd Kecukupan lembaga keuangan di daerah 144 Persepsi Pelaku usaha thd Kemudahan mengakses permodalan dari Perbankan di daerah
3	Peran Swasta dalam Keuangan Daerah	Mengukur seberapa besar pengaruh keberadaan swasta di daerah terhadap keuangan suatu daerah dan pendapatan masyarakat (Bagi Hasil PPH 21). Indikator ini juga untuk melihat tingkat upaya yang dilakukan oleh pemprov dalam mengalang dana dari swasta.	145 Bagi hasil PPH 21 (Pajak Karyawan) 146 Rasio Pajak Daerah Provinsi thd PDRB 147 Rasio PAD thd APBD 148 Persepsi Pemprov ttg Kontribusi Swasta thd PAD Provinsi.
4	Kontribusi sektor swasta dlm program CSR	Mengukur peran swasta dalam pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar.	149 Kontribusi sektor swasta dlm program CSR
5	Peran Swasta dalam Investasi & Penciptaan Lapangan Kerja	Mengukur peran swasta dalam menciptakan lapangan kerja. (Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Swasta), dan perekonomian daerah.	150 Peran Investasi Swasta thd Penciptaan Lapangan Kerja (Rasio realisasi invetasi penyerapan TK terhadap jumlah penduduk usia kerja pencari kerja). 151 Peran Investasi Swasta thd Perekonomian Daerah (Investasi PMDN Perkapita; dan Investasi PMA Perkapita).

LAMPIRAN:
Profil Investasi 33 Provinsi

Profil Investasi Provinsi NAD



Gubernur : **Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc**
IPMP : Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM)
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No.39 Banda Aceh
Telpon : (0651) 23170, Fax: (051) 23171
Website : www.nad.go.id

Kabupaten/Kota	: 19 Kab./4 Kota
Penduduk (2007)	: 4.223.800 Jiwa
Luas Wilayah	: 57.365,57 Km ²
PDRB Perkapita (2007)	: Rp.17.329.348
Laju Pertumbuhan PDRB (2007)	: 7,46%
IPM (2007)	: 69,5

Peran Badan Investasi dan Promosi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di penanaman modal
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksana kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal swasta.
6. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal .
7. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
8. Mengkoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
9. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1.782,78	Km
- Jalan Provinsi	1.071,82	Km
- Pelabuhan Laut	13	
- Pelabuhan Udara	8	
- Listrik		
(Kapasitas Terpasang PLTD)	264.65	MW
- Telekomunikasi	--	SST

Prospek Investasi:

- Kehutanan: luas hutan 3.335.693 Ha. Potensi: kayu, rotan, hewan liar, pelatihan gajah, dan lainnya.
- Perkebunan: kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan lainnya di Kab. Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Tengah.
- Perikanan: luas penangkapan ikan 59.363 Km². Jenis ikan: tuna, cakalang, hiu, bawal, kerang, dan ikan-ikan kecil lainnya.

- Peternakan: kuda, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan bebek di Kab. Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.
- Pertambangan: minyak dan gas, panas bumi, batu bara, mas, platinum, perak, besi dan lainnya di Kab. Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Besar, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Barat
- Pariwisata dan Perhotelan: di Kota Sabang (Pulau Weh), Kab. Aceh Tengah (Laut Tawar Lake), Kab. Aceh Tenggara (Taman Gunung Lauser), dll.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	27	1.468.017,4
PMA	7	372.286,3

Profil Investasi Propinsi Sumatera Utara



Gubernur: **H. Syamsul Arifin, SE**

IPMP: Badan Investasi dan Promosi

Alamat: Jl. Imam Bonjol No.11 Medan

Telpon: (061) 4564447, Fax: (061) 4564447

Website: www.sumutprov.go.id

Kabupaten/Kota : 25 Kab./8 Kota
Penduduk (2007) : 12.834.400 Jiwa
Luas Wilayah : 71.680,68 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 14.166.626
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,89%
IPM (2006) : 72,5

Peran Badan Investasi dan Promosi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang investasi dan promosi;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi, Promosi dan Informasi serta Pengawasan Pengendalian;
3. Melakukan Pengkajian dan Evaluasi Penyelenggaraan Promosi dan Investasi.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	: 2,098.05 Km
- Jalan Provinsi	: 2,145.6 Km
- Pelabuhan Laut	: 20
- Pelabuhan Udara:	7
- Listrik (Kapasitas Terpasang):	1.323.94 MW
- Telekomunikasi :	346.626 SST

Prospek Investasi:

- Pertanian & Perkebunan: Industri karet di Kab.Labuhan Batu, Simalungun, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah; Pengolahan minyak sawit di Kab. Simalungun, Asahan, dan Kota Medan; Perkebunan Kopi di Dairi, Pakpak Barat dan Tapanuli Utara; Hortikultura di Kab. Karo, Deli serdang, Dairi dan Pakpak Barat;
- Perikanan: Pertambahan laut di Kab. Asahan, Langkat, Deli Serdang dan Tapanuli Utara; daging ikan di Kota Medan & Kab. Deli Serdang; penangkapan ikan lepas pantai Kab. Tapanuli Tengah & Nias serta rekreasi penangkapan ikan di Kab. Nias Selatan.
- Pertambangan: Industri semen di Kab. Tapanuli Utara dan Langkat; Non Metal Kimia di Kab. Deli Serdang dan Kota Medan; Galian non metal dan Tekstil di Kota Medan dan Kab. Deli Serdang
- Pariwisata: wisata danau di Kab. Karo dan Dairi; Pusat Ekspedisi & Konveksi di Kota Medan.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN (Rp. Juta)	175	7.064.289,9
PMA (US\$. Ribuan)	153	3,964.173,4

Profil Investasi Provinsi Sumatera Barat



Gubernur : **H. Gamawan Fauzi, SH., MM.**
IPMP : Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD)
Alamat : Jln. Raden Saleh No.4B Padang
Telpon : (0751) 7059426, Fax: (0751) 7059594
Website : www.sumbarprov.go.id/bkppmd
Kabupaten/Kota : 12 Kab./7 Kota
Penduduk (2007) : 4.697.764 Jiwa
Luas Wilayah : 42.297,30 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp.12.729.257
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,34%
IPM (2007) : 72,98

Peran Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah:

1. Perencanaan dan pelaksanaan promosi dan investasi.
2. Koordinasi promosi dan investasi.
3. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal.
4. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan investasi di daerah

Ketersediaan Infrastruktur

- Jalan Negara	1.200.08 Km
- Jalan Provinsi	1.153.94 Km
- Pelabuhan Laut	5
- Pelabuhan Udara	3
- Listrik	2.020.546 MW
- Telekomunikasi	152.930 SST

Prospek Investasi

- Pertambangan Umum: Batubara, Biji Besi, Semen, Batu Obsidian, Granit.
- Perkebunan: Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Tebu, Gambir, Cassiavera, Pala, Gardamungu.
- Pariwisata dan Perhotelan: Wisata Bahari (Kab. Kep. Mentawai), Wisata Pulau-Pulau Kecil (Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman), Jasa Akomodasi Wisata (seluruh Kab./Kota), Travel & Biro Perjalanan (Kota Padang dan Kota Bukittinggi).
- Kelautan dan Perikanan: Penangkapan Ikan Tuna dan Cakalang (Kab. Kep. Mentawai), Penggaraman Ikan, Perebusan Ikan di atas Kapal, Long Liner (Kab. Kep. Mentawai dan Kab. Pesisir Selatan).
- Industri: Industri Pengolahan Minyak Kelapa, Industri CPO, Industri Inti Kelapa Sawit, Industri Karet, Industri Pengolahan Kakao, Industri Pengolahan Perikanan, Industri Ekstak Gambir, Industri Bumbu, Industri Furniture & Kerajinan.
- Perdagangan: Perdagangan Ekspor Impor, Departemen Store.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	43	2.728.331,3
PMA	26	317.161,4

Profil Investasi Propinsi Riau



Gubernur : **H.M. Rusli Zainal, SE, MP**
IPMP : Badan Promosi dan Investasi (BPI)
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru
Telpon : (0761) 20216, Fax: (0761) 20213
Website : www.riau.go.id, www.bpi.riau.go.id
Kabupaten/Kota : 9 Kab/2 Kota
Penduduk (2007) : 5.071.000 Jiwa
Luas Wilayah : 8.915.015 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 41.412.847
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 8,25%
IPM (2007) : 73.60

Peran Badan Promosi dan Investasi:

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemda di bidang promosi dan penanaman modal di daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh Pemda.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang promosi dan penanaman modal daerah.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya, sesuai mekanisme yang ditetapkan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
8. Memberikan pelayanan umum dan teknis dibidang promosi dan penanaman modal daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
9. Melaksanakan pelatihan dibidang promosi dan penanaman modal daerah.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1.126,11	Km
- Jalan Provinsi	2.162,82	Km
- Pelabuhan Laut	127	Buah
- Pelabuhan Udara	5	Buah
- Listrik	1.607.546	MW
- Telekomunikasi	--	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan Sapi di Kab. Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.
- Perkebunan: Pengolahan Sagu Terpadu di Kab. Bengkalis, Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Kampar dan Bengkalis.
- Perikanan Alami, Kolam dan Keramba di Kab. Kuantan Singingi, pembenihan Kakap di Kab. Bengkalis, peternakan Ikan Patin, Belida & Udang di Kab. Indragiri Hulu.
- Pariwisata dan Perhotelan: Wisata Danau Limbungan di Kota Pekanbaru, Wisata Bahari Pulau Rupat di Kab. Bengkalis, Wisata Air Panas Pangkalan Lesung di Kab. Pelalawan, Kawasan Wisata Pulau Jemur di Kab. Rokan Hilir.
- Industri dan perdagangan: Pengembangan KIT (Kawasan Industri Tenayan) di Kota Pekanbaru, Kawasan Industri Buton, Industri Hilir CPO di Kab.Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kab. Rokan Hulu, Industri pengolahan kelapa dan turunannya di Kab. Indragiri

Hilir, Pembangunan kawasan industri skala sedang & besar Tekstil, Elektronik, *Spare Part* Kendaraan di Kab. Pelalawan.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	112	24.249.719,0
PMA	55	4.146.753,7

Profil Investasi Propinsi Jambi



Gubernur : **Drs.Zulkifli Nurdin, MBA**
IPMP : Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
Alamat : Jl. R.M.Noor Admadibrata No.1A Telanai Pura
Jambi
Telpon : (0741) 669352, Fax: (0741) 60450
Website : www.jambiprov.go.id
Kabupaten/Kota : 9 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 2.742.200 Jiwa
Luas Wilayah : 45.348,49 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 11.697.441
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,58%
IPM (2006) : 71,3

Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah:

1. Perizinan dan Non Perizinan Untuk Investasi PMDN/PMA dan Non PMDN/PMA
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
3. Koordinasi Investasi Daerah

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	: 820,4	Km ²
- Jalan Provinsi	: 1.566,68	Km ²
- Pelabuhan Laut	: 1	
- Pelabuhan Udara	: 1	
- Listrik	: 117,679	MW
- Telekomunikasi	: 66.133	SST

Prospek Investasi:

- Perkebunan : Sawit dan Karet di Kab.Sarolangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur
- Tanaman Pangan : Kentang di Kab.Kerinci
- Pertambangan : Batu Bara di Kab.Bungo
- Peternakan : Sapi Potong, Kambing, dan Itik di Kab. Batang Hari
- Perikanan : Ikan Kolam/Keramba di Kab.Tanjab

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	47	7.370.580,5
PMA	10	154.161,1

Profil Investasi Propinsi Sumatera Selatan



Gubernur : **Ir. H. Alex Noerdin, SH.**
IPMP : Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal (DKPKM & PM)
Alamat : Jln. Kapten A. Rivai No.408 Palembang
Telpon : (0711) 368001, Fax: (0711) 368001
Website : www.sumsel.go.id
Kabupaten/Kota : 11 Kab/4 Kota
Penduduk (2007) : 7.020.000 Jiwa
Luas Wilayah : 8.701.742 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp.15.654.739
Pertumbuhan PDRB (2007) : 8,04%
IPM (2007) : 72.4

Peran Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah Dan Penanaman Modal (Terkait Penanaman Modal):

1. Perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
2. Penyusunan peta investasi daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi antarinstansi untuk penanaman modal;
4. Penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
5. Perencanaan dan pemberian fasilitasi pendukung penanaman modal;
6. Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelatihan di bidang penanaman modal;
8. dan lainnya berkaitan dengan penanaman modal daerah.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1.290,24	Km
- Jalan Provinsi	1.748,49	Km
- Pelabuhan Laut	1 Pelabuhan Boom Baru	
- Pelabuhan Udara	1 St.M. Badaruddin II	
- Listrik	1.769.474.000	Kwh
- Telekomunikasi	163.578	SST

Prospek Investasi:

- Pertanian: Beras dan tanaman pangan. Kab. Mura, OKI, Lahat
- Perkebunan: Sawit, Karet, Kopi. Kab. OKI, Musi Banyu Asin, Banyu Asin
- Perikanan: Kab. OKI, Musi Rawas,
- Pertambangan: Migas, Batubara. Kab. Muara Enim, Musi Rawas, Prabumulih
- Industri pengolahan: Kota Palembang, Kab Ogan Ilir, Kab. Banyuasin
- Pariwisata dan Perhotelan: Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	61	5.184.618,9
PMA	39	974.609,8

Profil Investasi Provinsi Bengkulu



Gubernur : **Agusrin M. Najamudin, S.T**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Alamat : Jln. Batanghari No.108 Padang Harapan,
Bengkulu
Telpon : (0736) 22044/21450, Fax: (0736) 21092
Website : www.provbengkulu.net
Kabupaten/Kota : 9 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 1.616.700 Jiwa
Luas Wilayah : 32.365,6 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp.7.930.113
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,03%
IPM (2006) : 71.3

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Investasi PMDN/PMA dan non PMDN/PMA.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi.
3. Koordinasi Investasi daerah.
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara (2006)	736,22	Km
- Jalan Provinsi (2006)	1406,49	Km
- Pelabuhan Laut	1	
- Pelabuhan Udara	1	
- Listrik	18,96 dan 210	MW
- Telekomunikasi	29.107	SST

Prospek Investasi:

- Perkebunan: kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, dan jarak.
- Pertambangan: batubara, emas, pasir besi, batu gamping, dan galian C.
- Perikanan laut seperti demersal, pelagis, tuna, cakalang, tenggiri, dan tongkol.
- Pariwisata: wisata alam seperti pantai panjang, pulau tikus, dan bukit kaba.
- Pertanian: padi dan tanaman hortikultura seperti cabe, jagung, jahe, kacang tanah.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN (Rp. Juta)	9	172.494,7
PMA (US\$. ribu)	4	78.894,2

Profil Investasi Propinsi Lampung



Gubernur : **Syamsurya Ryacudu**
IPMP : Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata (DPIK & P)
Alamat : Jl. Jend.Sudirman No. 29 Bandar Lampung
Telpon : (0721) 26430, Fax: (0721) 266184
Website : www.lampung.go.id
Kabupaten/Kota : 9 Kab./2 Kota
Penduduk (2007) : 7.289.800 Jiwa
Luas Wilayah : 35.376 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 8.357.190
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,14 %
IPM (2007) : 70,2

Peran Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata (Terkait Investasi):

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Investasi PMDN/PMA dan non PMDN/PMA dengan sistem one stop service.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
3. Koordinasi Investasi daerah.
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur

Jalan Negara	1.004,16	Km
Jalan Provinsi	2.369,97	Km
Pelabuhan Laut	3	
Pelabuhan Udara	1	
Listrik	1.698.807	Mwh
Telekomunikasi	119.427	SST

Prospek Investasi:

- Pertanian padi, jagung dan ubi kayu dan pengolahan hasil pertanian di Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan
- Peternakan (Penggemukan Sapi dan Kambing Boerawa) di Kab. Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang
- Perikanan (perikanan air laut, air tawar, tambak dan pengolahan ikan beku) di Kab. Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tanggamus
- Perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, kopi dan pengolahan) di Kab. Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara
- Energi terbarukan dan panas bumi di Kab. Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	83	5.403.804,3
PMA	51	704.133,0

Profil Investasi Propinsi Bangka Belitung



Gubernur: **Ir. H. Eko Maulana Ali MSc, SAP**

IPMP: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Provinsi Babel,
Air Itam, Pangkal Pinang

Telpon: (0717) 424123/439223, Fax: (0717) 437706

Website: www.bangkabelitungprov.go.id
www.babel-investment.com

Kabupaten/Kota	: 6 Kab./1 Kota
Penduduk (2007)	: 1.106.700 Jiwa
Luas Wilayah	: 81.725,14 km ²
PDRB Perkapita (2007)	: Rp. 16.170.337
Pertumbuhan PDRB (2007)	: 5,37%
IPM (2007)	: 71.20

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi:

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk PMDN/PMA dan non PMA/PMDN
2. Perencanaan dan pelaksanaan promosi daerah
3. Koordinasi investasi daerah
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	: 530,65	Km
- Jalan Provinsi	: 529,17	Km
- Pelabuhan Laut	: 8	
- Pelabuhan Udara	: 2	
- Listrik	: 341.078.821	KWH
- Telekomunikasi	: 27.020	SST

Prospek Investasi:

- Pertanian (pangan dan hortikultura), perkebunan dan kehutanan (kawasan hutan seluas 657.510 Ha) di Kab. Bangka & Bangka Selatan
- Kelautan dan perikanan: aneka jenis ikan, budi daya laut, dan pengolahan di Kab. Bangka, Belitung & Belitung Timur
- Pertambangan (Timah dan aneka Bahan Galian Golongan C) menyebar di berbagai kepulauan, khususnya Pulau Bangka & Belitung
- Industri Pengolahan di Kota Pangkalpinang

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	10	1.017.852,4
PMA	9	131.485,4

Profil Investasi Kepulauan Riau



Gubernur : **Drs. H. Ismeth Abdullah**
 IPMP : Badan Promosi dan Investasi Daerah
 Daerah (BPID)
 Alamat : Jl.Basuki Rahmat
 Telpon : (0771) 315836
 Website : www.kepriprov.go.id
 Kabupaten/Kota : 4 Kab./2 Kota
 Penduduk (2007) : 1.392.900 Jiwa
 Luas Wilayah : 425.214.,67 Km²
 PDRB Perkapita (2007) : Rp. 37.206.980
 Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 7,55 %
 IPM 2007 : 72.8

Peran Badan Promosi Dan Investasi Daerah:

1. Pelaksanaan koordinasi/konsultasi kedalam dan keluar daerah.
2. Promosi dan kerjasama investasi pada kegiatan.
3. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi .
4. Peningkatan dan pengembangan sistim informasi manajemen.
5. Peningkatan rencana pembangunan daerah.
6. Promosi dan kerjasama investasi pembangunan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana investasi.
7. Pembinaan dan pengembangan aparatur dibidang promosi, dan pelayanan penanaman modal tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Bimbingan dan fasilitasi Bagi Penanam modal.

Ketersediaan Infrastruktur.

Jalan Negara	: 715.55	Km
Jalan Provinsi	: 530.02	Km
Pelabuhan Laut	: 22	
Pelabuhan Udara	: 6	
Listrik		
(Batam, Bintan, Tanjungpinang)	: 438	MW
Telekomunikasi	: 141704	SST

Prospek Investasi.

1. Karimun : Produksi Karet, kelapa, Lada, Perikanan, dan tambang,
2. Bintan : Produksi Palawija, Sayur, Karet, kelapa, Lada, Cengkeh, Kelapa sawit, Perikanan,tambang, industry, dan pariwisata
3. Natuna : Produksi Pertanian (Padi), Karet, Lada Cengkeh, Perikanan, dan industri
4. Lingga : Produksi sayur, Karet, kelapa, Lada, Sagu, Perikanan,Tambang,
5. Batam : Produksi Palawija, sayur, Perikanan, dan industri
6. Tanjungpinang : Pariwisata, Tambang, industry, dll.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	48	612.300,8
PMA	275	2.157.532,1

Profil Investasi Propinsi DKI Jakarta



Gubernur : **DR.Ing.H.Fauzi Bowo**

IPMP : Badan Penanaman Modal dan

Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah (BPM PKUD)

Alamat : Jln. Letjend MT.Haryono Kav 45-46 Jakarta

Telpon : (021) 7949660, Fax: (021) 7949567

Website : www.bpmpkud.go.id

Kabupaten/Kota : 5 Kota & 1 Kab

Penduduk (2007) : 9.064.600 Jiwa

Luas Wilayah : 661,52 Km²

PDRB Perkapita (2007) : Rp 62.490.337

Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 5,97 %

Indeks Pembangunan Manusia (2007) : 76,68

Peran Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha daerah.
2. Penyusunan rencana Penanaman Modal daerah dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah.
3. Promosi kepada para calon Investor mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi.
4. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan Surat Persetujuan dan pemberian Fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan yang berhubungan dengan Penanaman Modal.
5. Pembinaan pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
6. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk Pembangunan Daerah.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Panjang Jalan Negara	163.779,75	Km
- Panjang Jalan Provinsi	1.326.553,91	Km
- Pelabuhan Laut	1	
- Pelabuhan Udara	1	
- Listrik	23,785,687,454.00	MW
- Telekomunikasi fix-line	1.938.874	SST

Prospek Investasi:

- Manufaktur: industri pakaian jadi, percetakan, farmasi, komponen kendaraan bermotor, meubel dan perlengkapan, dll.
- Perdagangan: budidaya dan pemasaran ikan hias, pengembangan pasar tanaman hias, bisnis retail, perdagangan besar, dll.
- Jasa: perbankan, pariwisata (wisata alam Pulau Seribu, wisata budaya), dll.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN (Rp. Juta)	773	39.796.799,9
PMA (US\$. Ribuan)	2.740	22.330.679,9

Profil Investasi Jawa Barat



Gubernur : **Ahmad Heryawan**
IPMP : Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)
Alamat : Jalan Sumatera No.50 Bandung
Telpon : (022) 4237369, Fax: (022) 4237081
Website : www.westjavainvest.com
Kabupaten/Kota : 17 Kab/9 Kota
Penduduk (2007) : 40.329.100 Jiwa
Luas Wilayah : 29 276,72 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 13.048.168
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,86%
IPM (2007) : 70,69

Peran Instansi Penanaman Modal:

1. Menciptakan rumusan kebijakan teknis promosi dan penanaman modal yang terarah dan terpadu secara regional
2. Mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan stakeholders
3. Mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1 140,69	Km
- Jalan Provinsi	2.199 ,12	Km
- Pelabuhan Laut	9	
- Pelabuhan Udara	3	
- Listrik	5500	MW
- Telekomunikasi	--	SST

Prospek Investasi:

- Sektor Primer: Tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan.
- Sektor Sekunder: Industri makanan, tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, kayu, kertas dan percetakan, kimia dan farmasi, karet dan plastik, mineral non logam, logam, mesin dan elektronik, instrument kedokteran, presisi, optik dan jam, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya.
- Sektor Tertier: Listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restaurant, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, jasa lainnya.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	1.101	66.696.782,9
PMA	2.258	24.377.826,3

Profil Investasi Propinsi Jawa Tengah



Gubernur : Bibit Waluyo

IPMP : Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)

Alamat : Jln.Mgr.Soegijapranata No.1 Semarang

Telpn : (024) 3547091, Fax: (024) 3549560

Website : www.central-java.com

Kabupaten/Kota : 29 Kab./6 Kota

Penduduk (2007) : 32.380.300 Jiwa

Luas Wilayah : 32.799,71 km²

PDRB Perkapita (2007) : Rp 9.648.737

Laju Pertumbuhan PDRB : 4,79%

(2007) : 70,3

IPM (2006)

Peran Badan Penanaman Modal Daerah:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi melalui RKPPM, mengadakan event promosi, kerjasama dengan pihak-pihak swasta/profesional
2. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal melalui temu usaha dan rekomendasi pembentukan *task-force*, fasilitasi Perda Investasi, fasilitasi rating kabupaten/kota Jateng pro investasi, dll.

Ketersediaan Infrastruktur:

Jalan Negara	1.297,63	Km
Jalan Provinsi	2.589,61	Km
Pelabuhan Laut	5	
Pelabuhan Udara	4	
Listrik	2.500	MW
Telekomunikasi	1 juta	SST

Prospek Investasi:

- Infrastruktur: PDAM Solo, Air Bersih Wadaslintang Kebumen, jalan tol dll.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Kendal, LIK Boyolali, Solo Technopark dll.
- Pengembangan Kawasan Pariwisata: Taman Laut Karimunjawa, Borobudur dll.
- Pertambangan: pabrik semen kecil di Rembang, Grobogan, Pati dll.
- Manufaktur: pabrik pengolahan dan cold storage ikan Demak, Tegal, pantura, pabrik gula kelapa Purbalingga dll.
- Industri: Tekstil, Industri Komponen Kendaraan dll.
- Pertanian: pembenihan ternak besar Rembang, Banjarnegara dll., albasia, karet rakyat dll.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN (Rp. Juta)	308	10.861.030,7
PMA (US\$. Ribu)	245	1.675.523,7

Profil Investasi Propinsi DIY



Gubernur : **Sri Sultan Hamengku Buwono X**
IPMP : Bapeda--Bidang Investasi dan Pemasaran
Potensi Wilayah
Alamat : Kompleks Kepatihan Danuredjan Yogyakarta
Telpon : (0274) 562811
Website : www.pemda-diy.go.id

Kabupaten/Kota : 4 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 3.434.500 Jiwa
Luas Wilayah : 3.185,80 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 9.584.047
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 4,31%
IPM (2006) : 73.71

Peran Bapeda--Bidang Investasi dan Pemasaran Potensi Wilayah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di bidang investasi dan melaksanakan peningkatan pemasaran potensi wilayah;
2. Mengembangkan kerjasama pemerintah dengan swasta/investor dalam membangun lingkungan bisnis;
3. Melaksanakan regulasi, pelayanan investasi, ijin usaha tetap, dan persetujuan fasilitas yang terkait dengan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian investasi;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Investasi dan Pemasaran Wilayah

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	168,81	Km
- Jalan Provinsi	690,25	Km
- Pelabuhan Laut	-	
- Pelabuhan Udara	1	
- Listrik	616	MW
- Telekomunikasi	8,7 Juta	SST

Prospek Investasi:

- Pariwisata: wisata budaya di Kota Yogyakarta, wisata pedesaan di Kab. Sleman, Gunung Kidul. Bantul dan Kulonprogo
- Kerajinan: furniture di Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman, Terakota dan keramik di Kab. Bantul, batik di Kab. Kulonprogo
- Pertanian: budidaya dan pengelolaan pertanian di di Kab. Sleman, Gunung Kidul. Bantul dan Kulonprogo
- Industri: garmen, elektronik, pembangkit listrik di di Kab. Sleman dan Bantul

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	74	1.195.785,8
PMA	51	171.767,9

Profil Investasi Propinsi Jawa Timur



Gubernur : **Imam Oetomo**
IPMP : Badan Penanaman Modal (BPMD)
Alamat : Jl. Jagir Wonokromo No. 352 Surabaya
Telpon : (031) 8410877, Fax: (031) 8412363
Website : www.jatim.go.id

Kabupaten/Kota : 29 Kab./9 Kota
Penduduk (2007) : 36.895.600 Jiwa
Luas Wilayah : 46.689, 64 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 14.498.199
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,04 %
IPM (2007) : 69,68

Peran Badan Penanaman Modal:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah
2. Koordinasi Investasi di Kota dan Kabupaten
3. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1899, 21	Km
- Jalan Provinsi	1518,6	Km
- Pelabuhan Laut	60	
- Pelabuhan Udara	4	
- Listrik	19.000	MW
- Telekomunikasi	1.742.189	SST

Prospek Investasi

- Tanaman Pangan dan Holtikultura
- Perikanan dan Kelautan
- Pertambangan dan Energi
- Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan
- Industri Pengolahan
- Pariwisata dan Perhotelan
- Perdagangan

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	633	25.973.718,4
PMA	619	10.437.601,4

Profil Investasi Propinsi Banten



Gubernur : **Hj. Ratu Atoet Chosiyah, SE**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Alamat : Jln. Veteran No.12 Serang
Telpon : (0254) 200547, Fax: (0254) 218884
Website : www.banten.go.id
Kabupaten/Kota : 4 Kab./4 Kota
Penduduk (2007) : 9.423.400 Jiwa
Luas Wilayah : 9.018,64 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 11.400.592
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6.04%
IPM (2007) : 68,76

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal:

1. Meningkatkan SDM di Bidang Penanaman Modal.
2. Mengembangkan perencanaan program dan peningkatan promosi dan kerjasama di dalam dan luar negeri.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan sumber daya penanaman modal.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	455,61	Km
- Jalan Provinsi	257,22	Km
- Pelabuhan Laut	2	
- Pelabuhan Udara	1	
- Listrik (Daya Tersambung)	1.568.985	Kva
- Telekomunikasi	451.545	SST

Prospek Investasi:

- Agrobisnis: ikan hias, tanaman hias, tanaman padi
- Pariwisata: wisata bahari
- Industri Pengolahan: Emping Melinjo
- Pertambangan: Emas dan Perak

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	543	34.142.033,9
PMA	914	13.956.059,3

Profil Investasi Propinsi Bali



Gubernur : **Made Mangku Pastika**
 IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 Alamat : Jln.D.I.Panjaitan No.05 Denpasar
 Telpon : (0361) 229593, Fax: (0361) 236037
 Website : www.baliprov.go.id
 Kabupaten/Kota : 8 Kab./1 Kota
 Penduduk (2007) : 3.479.800 Jiwa
 Luas Wilayah : 5,636,66 Km³
 PDRB Perkapita (2007) : Rp 12.166.391
 Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 5,92 %
 IPM (2007) : 70,91

Peran BPM:

1. Pengkajian dan pengembangan Penanaman Modal
2. Perijinan
3. Promosi Penanaman modal
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	501,64	KM
- Jalan Provinsi	883,07	KM
- Pelabuhan laut	4	
- Pelabuhan Udara	1	
- Listrik	2.563.503.161	KWH
- Telekomunikasi (2004)	203.070	SST

Prospek Investasi:

- Pariwisata: Agro wisata (Tabanan, Gianyar), Desa Budaya (Gianyar, Karangasem), Wisata Bahari (Karangasem), Rekreasi Berkuda (Gianyar), Wisata alam (Gianyar).
- Peternakan: Sapi Potong (Jembrana, Klungkung, Karangasem), Sapi Kereman (Tabanan, Gianyar), Ayam (Jembrana), Babi (Karangasem), Pembibitan Sapi (Bangli)
- Perikanan: Rumpul Laut (Badung, Buleleng), Kodok Taiwan (Badung), Ikan Nila (Tabanan, Bangli), Gurame (Tabanan), Udang Galah (Tabanan, Karangasem, Gianyar), Lobster air tawar (Tabanan)
- Perkebunan: Kopi (Bangli, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Kakao (Gianyar, Jembrana, Tabanan), Tembakau Virginia (Buleleng, Panilli (Jembrana),
- Industri: Minyak Daun Cengkeh (Tabanan), Saos Cabe & Tomat (Tabanan), Sabut Kelapa (Tabanan), Nata de Coco (Jembrana), Genteng Glasir (Jembrana), Pengalengan Buah-buahan), Kopi Bubuk (Bangli), Buah Jeruk (Bangli)

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	166	2.501.721,5
PMA	455	2.643.554,0

Profil Investasi Propinsi NTB



Gubernur: **K.H. M. Zainul Majdi, MA**

IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)

Alamat : Jalan Udayana No.04 Mataram

Telpon : (0370) 632632, Fax: (0370) 634926

Website : www.ntb.go.id

Kabupaten/Kota : 7 Kab./2 Kota

Penduduk (2007) : 4.292.500 jiwa

Luas Wilayah : 20.153,15km²

PDRB Perkapita (2007) : RP 7.808.657

Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 4,89%

IPM (2006) : 63.0

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Investasi PMDN/PMA dan Non PMDN/PMA
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Wisata
3. Koordinasi Investasi daerah
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

Jalan Negara	:	601,83	Km
Jalan Provinsi	:	1.842,33	Km
Pelabuhan Laut	:	11	
Pelabuhan Udara	:	3	
Listrik	:	111	MW
Telekomunikasi	:	--	SST

Prospek Investasi:

Peternakan	:	Sapi, Kerbau, Kambing, Kuda, Ayam dan Itik di berbagai Kabupaten di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok
Perkebunan	:	Rambutan, durian, cokelat, cengkeh, Jambu mete, kakao, vanili, mangga, kelapa, dan kapas di berbagai Kabupaten Pulau Lombok; jambu mete, kelapa, kakao, dan kemiri di berbagai Kabupaten Pulau Sumbawa
Perikanan	:	Mutiara, lobster di Kab. Lombok Barat; rumput laut, lobster, kerapu di Kab. Lombok Timur dan Lombok Tengah; rumput laut, tripang, lobster, kerapu di berbagai Kabupaten Pulau Sumbawa
Pariwisata	:	Pantai senggigi, sekotong, narmada, Gili Trawangan, Gili Air dan gili Meno, Gerabah-Banyumulek (Kab. Lombok Barat); Pantai Selong Belanak, Pantai Kuta dan sekitarnya, Desa sade (Kab. Lombok

Tengah); Gili Lampu, Gunung Rinjani di Kab. Lombok Timur); dan Kawasan maluk Sumbawa Barat, Gunung Tambora, Pantai Hu'u di kab. Dompu (Pulau Sumbawa).

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	23	323.076,0
PMA	37	50.814,3

Profil Investasi Propinsi NTT



Gubernur : **Drs. Frans Lebu Raya**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
Alamat : Jln. Teratai No.10 Kupang
Telpon : (0380) 833080, Fax: (0380) 833213
Website : www.bkpmmd-ntt.go.id; www.nttprov.go.id
Kabupaten/Kota : 20 Kab./1Kota
Penduduk (2007) : 4.448.900 Jiwa
Luas Wilayah : 47.549,9 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp.4.301.535
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 5,15%
IPM (2007) : 66,72.

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
2. Koordinasi Investasi Daerah.
3. Bimbingan dan Fasilitas Penanaman Modal

Catatan: Peran pelayanan perijinan dan non-perijinan relatif kecil karena masih merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ketersediaan Infrastruktur (2007):

- Jalan Negara	2.464,32	Km
- Jalan Provinsi	2.939,21	Km
- Pelabuhan Laut	16	
- Pelabuhan Udara	14	
- Listrik (Energi Terjua)	297.657	MWH
- Telekomunikasi		
- Kapasitas Sentral	80.000	SST
- Kapasitas Terpasang	75.046	SST
- Kapasitas Terpakai	56.382	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan Sapi, Kuda, Babi dan Kerbau: Kab. Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kupang, Sumba Barat dan Sumba Timur
- Perkebunana Kakao dan Kopi: Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada
- Perikanan Kerapu dan Rumput Laut: Kab. Sikka, Rote Ndao dan Kupang
- Pariwisata dan Perhotelan: Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat dan Alor.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	7	138.526,9
PMA	13	23.148,9

Profil Investasi Propinsi Kalimantan Barat



Gubernur : **Drs. Cornelis, MH**
IPMP : Badan Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Promosi dan Investasi (BAKOMAPIN)
Alamat : Jln. Sutan Syahrir No.17 Pontianak
Telpon : (0561) 743491, Fax: (0561) 769472
Website : www.kalbar.go.id
Kabupaten/Kota : 12 Kab./2 Kota
Penduduk (2007) : 4.178.500 Jiwa
Luas Wilayah : 146.807 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp.10.165.998
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,02%
IPM (2007) : 69,81

Peran BAKOMAPIN (Terkait Penanaman Modal):

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang promosi dan investasi.
2. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang investasi

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1.575,32	Km
- Jalan Provinsi	1.517,93	Km
- Pelabuhan Laut	8	
- Pelabuhan Udara	5	
- Listrik	285.342	MW
- Telekomunikasi	--	SST

Prospek Investasi:

- Perkebunan kelapa sawti, karet dan kakao
- Pertambangan bahan galian pasir besi, emas, batubara dan bauksit
- Kehutanan berfokus pada bidang HTI dan industri pengolahan hutan
- Aneka industri (tekstil, kayu, kertas, farmasi, kimia, logam, dll)

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	52	1.872.047,8
PMA	15	193.477,1

Profil Investasi Propinsi Kalimantan Tengah



Gubernur : **Agustin Teras Narang, SH**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
Alamat : Jln. Cilik Riwut Km.5,5 Palangkaraya
Telpon : (0536)3231414, Fax: (0536) 3231454
Website : www.kalteng.go.id
Kabupaten/Kota : 13 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 2.028.300 Jiwa
Luas Wilayah : 153.564 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp. 13.765.224
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,06%
IPM (2007) : 73,45%

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah
2. Promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri
3. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara/Propinsi/Kabupaten/ Kota atau Badan/Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri
4. Penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perijinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal
5. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal
6. Pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia
7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal daerah

Ketersediaan Infrastruktur:

Jalan Negara	1.714,95	Km
Jalan Provinsi	1.776.15	Km
Pelabuhan Laut	10	
Pelabuhan Udara	8	
Listrik (Produksi)	458.283.199	KWh
Telpon l	--	SST

Prospek Inveslasi:

- Perkebunan: pengembangan industri kelapa sawit dan CPO, karet, rotan, kelapa, kopi dan nilam
- Pertambangan: batubara, emas, perak, biji besi. scng, sirkon, pasir kuarsa, kristalkuarsa, kaolin dll.
- Pertanian: padi dan nenas
- Perikanan: ikan air tawar, labi-labi, ikan hias botia dan kan-ikan laut
- Pelernakan: Ayam ras, sapi\ faabi, biri-biri, kerbau rawa, dan kambing

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	34	2.895.451,0
PMA	24	286.563,0

Profil Investasi Propinsi Kalimantan Selatan



Gubernur : **H. Rudy Arifin**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
Alamat : Jl. Pangeran Samudera No 40 Banjarmasin.
Telpon : (0511) 3354154, Fax: (0511) 4368012
Website : www.kalselprov.go.id
Kabupaten/Kota : 11 Kab./2 Kota
Penduduk (2007) : 3.396.700 Jiwa
Luas Wilayah : 37.530,52 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 11.610.975
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,08%
IPM (2006) : 67,7

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Investasi PMDN/PMA dan non PMDN/PMA.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
3. Koordinasi Investasi daerah.
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	864,07	Km
- Jalan Provinsi	734,23	Km
- Pelabuhan Laut	6 (Pelabuhan Umum) 62 (Pelabuhan Khusus)	
- Pelabuhan Udara	2 (Bandara Umum) 4 (Bandara Khusus)	
- Listrik	1.201.699	MW
- Telekomunikasi	--	SST

Prospek Investasi:

- Pertanian; padi jagung, kacang tanah, ubi kayu, pisang, jeruk, nenas, jahe, dan kencur.
- Perkebunan; karet, kelapa sawit, kelapa dalam dan lada.
- Peternakan; sapi, kerbau, ayam ras serta itik.
- Perikanan; Ikan (kerapu, bandeng, nila, patin dan ikan mas), Udang (windu, paneme, putih), dan rumput laut.
- Kehutanan; rotan, akasia, gaharu dan madu.
- Pertambangan; batubara dan biji besi.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN (Rp. Juta)	76	3.596.985,9
PMA (US\$. Ribu)	26	401.123,8

Profil Investasi Propinsi Kalimantan Timur



Gubernur: **Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si**

IPMP: Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID)

Alamat: Jl. Basuki Rahmat No.56 Samarinda

Telepon: (0541) 743235, Fax: (0541) 736446

Website: www.bpid.kaltimprov.go.id

Kabupaten/Kota : 14 kab/kota

Penduduk : 3.024.800 Jiwa

Luas Wilayah : 245.237,80 km²

PDRB Perkapita (2007) : Rp 70.120.040

Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 9,56%

IPM (2007) : 74,16

Peran Badan Promosi dan Investasi Daerah:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang promosi dan investasi daerah;
2. Penyusunan rencana pengembangan investasi daerah;
3. Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan promosi, investasi/pembeli dalam dan luar negeri;
4. Melakukan penanganan pelayanan investasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, dekonsentrasi, investasi di wilayah laut dari 4 sampai 12 Mil dan yang tidak/belum ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Penyiapan bahan system informasi penanaman modal dan produksi pengelolaan teknologi informasi;

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	: 1,539.70	Km
- Jalan Provinsi	: 645.4	Km
- Pelabuhan Laut	: 9	
- Pelabuhan Udara	: 11	
- Listrik Kapasitas Terpasang	: 398.00	MW
- Telekomunikasi	: 285,194	SST

Prospek Investasi:

- Pertanian & Perkebunan: industri karet; pengolahan minyak sawit; perkebunan kopi; hortikultura; coklat; biji-bijian kelapa; tembakau dan nilam
- Perikanan: daging ikan; penangkapan ikan lepas pantai dan rekreasi penangkapan ikan
- Pertambangan: industri semen di Kab. Tapanuli Utara dan Langkat; Non Metal Kimia di Kab. Deli Serdang dan Kota Medan; Galian non metal dan Tekstil di Kota Medan dan Kab. Deli Serdang
- Pariwisata: wisata danau di Kabupaten Karo dan Dairi; Pusat Ekspedisi & Konveksi di Kota Medan.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	101	12.839.139,8
PMA	75	1.809.175,7

Profil Investasi Propinsi Sulawesi Utara



Gubernur : **Drs. Sinyo Harry Sarundajang**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Kerjasama Regional (BKPM KR)
Alamat : Jl. 17 Agustus No. 69 Manado
Telpon : (0431) 865559, Fax: (0431) 860334
Website : www.sulut.go.id
Kabupaten/Kota : 11 Kab/ 4 Kota
Penduduk (2007) : 2.186.800 Jiwa
Luas Wilayah : 15.272,44 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 11.100.201
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,47%
IPM (2007) : 74,72

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kerjasama Regional:

1. Sistem pelayanan perijinan dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Merencanakan dan melaksanakan promosi Investasi baik dalam negeri maupun Luar negeri
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan investasi.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	809,42	Km
- Jalan Provinsi	2.119,94	Km
- Pelabuhan Laut	13	
- Pelabuhan Udara	4	
- Listrik	125	MW
- Telekomunikasi	104.279	SST

Prospek Investasi:

- Pariwisata: Wisata Alam dan Wisata Budaya
- Perikanan Budidaya: Udang, nila, ikan karapu, ikan hias dan ikan mas
- Perkebunan Kelapa, Cengkih & Pala di Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dll.
- Komoditas Bunga di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dll.
- Kawasan Industri di Bitung-Kema

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	23	822.310,1
PMA	28	92.622,9

Profil Investasi Propinsi Sulawesi Tengah



Gubernur : **H.B.Paliudju**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
Alamat : Jl. Pramuka no. 23 Palu
Telpon : (0451) 421807, Fax: (0451) 424325
Website : www.bkpmmd-sulteng.go.id
Kabupaten/Kota : 10 Kab/1 Kota
Penduduk (2007) : 2.396.200 Jiwa
Luas Wilayah : 261.956 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 9.074.112
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 7,25%
IPM (2007) : 69,56

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Merumuskan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Investasi Daerah.
2. Merumuskan Kebijakan Promosi dan Informasi Investasi Daerah.
3. Merumuskan Kebijakan bidang Pelayanan Umum dan Pengendalian Investasi.
4. Merumuskan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Investasi di Daerah.
5. Pengkoordinasian pelaksanaan promosi dan investasi daerah.

Ketersediaan Infrastruktur

- Jalan Negara	1.593,00	Km
- Jalan Provinsi	1.799,29	Km
- Pelabuhan Laut	9	
- Pelabuhan Udara	5	
- Listrik	155,830.00	MW
- Telekomunikasi	--	SST

Prospek Investasi:

- Pertanian dan Perkebunan: kakao, rotan di Kab. Donggal, Parigi Moutung, Poso.
- Kelautan dan Perikanan: budidaya ikan laut, perairan umum dan rumput laut di Kab. Bangkep, Donggala, Morowali, Banggai, Tojo Una-una, dll
- Pertambangan dan Energi: bahan galian strategis (nikel, batubara, dll) di Kab. Donggal, Toli-Toli, bahan galian vital dan golongan C.
- Peternakan: sapi dan pengolahan daging sapi di Kab. Buol, Toli-Toli, Banggai, Parigi Moutung, dll
- Pariwisata: wisata alam (Taman Laut Teluk Tomini), wisata budaya, dll

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	17	725.653,6
PMA	14	618.897,4

Profil Investasi Propinsi Sulawesi Selatan



Gubernur : **Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH**
IPMP : Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.269 Makassar
Telpn : (0411) 453614/453758
Website : www.bppmd_sulsel.go.id
Kabupaten/Kota : 21 Kab./2 Kota
Penduduk (2007) : 7.700.300 Jiwa
Luas Wilayah : 45.764,53 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 8.996.056
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,35%
IPM (2007) : 69,62

Peran Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah:

1. Koordinasi promosi perencanaan dan promosi melibatkan Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait.
2. Pembinaan dan bimbingan berupa kegiatan Penguatan Kelembagaan, Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal, Bimbingan Pengisian LKPM, dan Bimbingan Tata Cara Berpromosi

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1.209,40	Km
- Jalan Provinsi	1.556,13	Km
- Pelabuhan Laut	16	
- Pelabuhan Udara	8	
- Listrik (Kap. Terpasang)	619	MW
- Telekomunikasi	277. 231	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan : Sapi
- Perkebunan : Kakao, Kopi
- Perikanan : Udang, Rumput Laut, Ikan Kakap dan Tuna, Teripang
- Pariwisata dan Perhotelan: Mice dan Wisata Bahari

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	82	2.886.718,9
PMA	42	730.081,9

Profil Investasi Propinsi Sulawesi Tenggara



Gubernur : **H. Nur Alam, SE**

IPMP : Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah

Alamat : Jln. Mayjend S. Parman No. 4 Kendari

Telpon : (0401) 321724 Fax: (0401) 329672

Website : www.sultra.go.id

Kabupaten/Kota : 10 Kab/2 Kota

Penduduk (2007) : 2.031.500 Jiwa

Luas Wilayah : 38.140 Km²

PDRB Perkapita (2007) : Rp 8.837.210

Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 7,96%

IPM (2007) : 68,63

Peran Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Investasi PMDN/PMA dan non PMDN/PMA.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
3. Koordinasi Investasi daerah
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	1.328,92	Km
- Jalan Provinsi	489,20	Km
- Pelabuhan Laut	6	
- Pelabuhan Udara	3	
- Listrik	245.607	Kw
- Telekomunikasi	33.200	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan Sapi di Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka
- Perkebunan: Jambu Mete di Kab. Muna dan Kab. Buton. Perkebunan Kakao di Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe dan Kab. Konawe Selatan.
- Perikanan: Budidaya di Kab. Konawe, Kolaka dan Kolaka Utara. Penangkapan di Kab. Buton, Kota Kendari, Kab. Wakatobi dan Kab. Konseil.
- Pertambangan : Nikel di Kab. Konawe Utara dan Emas di Kab. Bombana.
- Pariwisata : Kota Bau-Bau dan Kab. Wakatobi (Wisata bawah laut).

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	10	3.200.041,4
PMA	9	16.568,7

Profil Investasi Propinsi Gorontalo



Gubernur : **DR.Ir.H.Fadel Muhammad**
IPMP : Badan Investasi Daerah (BID)
Alamat : Jln. Sapta Marga Gorontalo
Telpon : (0435) 827007
Website : www.gorontaloprov.go.id

Kabupaten/Kota : 5 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 960.335 Jiwa
Luas Wilayah : 12.215 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 4.957.328
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 7,51%
IPM (2007) : 68,83

Peran Badan Investasi Daerah:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Investasi PMDN/PMA dan non PMDN/PMA.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
3. Koordinasi Investasi daerah.
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Ketersediaan Infrastruktur:

Jalan Negara	305,50	Km
Jalan Provinsi	153,34	Km
Pelabuhan Laut	4	
Pelabuhan Udara	1	
Listrik	46,915	KW
Telekomunikasi	5.370	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan Sapi, Ayam dan Bebek
- Perkebunan Sawit, Kelapa, Cengkeh, Kemiri, dll
- Perikanan Tangkap, Budidaya Ikan Air Tawar dan Rumput Laut

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	3	711.081,0
PMA	5	66.904,4

Profil Investasi Propinsi Sulawesi Barat



Gubernur : **Anwar Adnan Saleh**
IPMP : Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD)
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.30 Mamuju
Telpon : (1426) 21358
Website : www.sulbarprov.go.id
www.bppmd-sulawesibarat.com
Kabupaten/Kota : 5 Kabupaten
Penduduk (2007) : 1.016.700 Jiwa
Luas Wilayah : 16.937,18 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 6.091.286
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 7,43 %
IPM (2007) : 67,77

Peran Badan Promosi Penanaman Modal Daerah:

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk investasi PMA/PMDN;
2. Perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi;
3. Koordinasi investasi daerah;
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	538,70	Km
- Jalan Provinsi	602,95	Km
- Pelabuhan Laut	5	
- Pelabuhan Udara	27	
- Listrik	30.754	MW
- Telekomunikasi	1596	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan Sapi: Kab. Mamuju dan Kab. Polowali Mandar
- Perkebunan Kakao: Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Majene, Kab. Polowali Mandar dan Kab. Mamasa
- Perkebunan Sawit: Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara
- Perikanan: Kab. Majene dan Kab. Polowali Mandar
- Pariwisata dan Perhotelan: Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Polowali Mandar dan Kab. Mamuju Utara

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	8	377.901,2
PMA	0	0

Profil Investasi Propinsi Maluku



Gubernur : **Karel Albert Ralahalu**

IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)

Alamat : Jl. Pengeringan Pantai Waihaong, Ambon

Telpon : (0911) 314245, Fax: (0911) 314246

Website : www.bkpmmd-maluku.com

Kabupaten/Kota : 9 Kab./2 Kota

Penduduk (2007) : 1.302.000 Jiwa

Luas Wilayah : 581.376 Km²

PDRB Perkapita (2007) : Rp 4.377.086

Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 5,74%

IPM (2007) : 70,44

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur pemerintah maupun pelaksanaan bisnis di daerah
3. Koordinasi Investasi daerah.
4. Bimbingan dan fasilitasi penanaman modal

Catatan: Peran pelayanan perijinan dan non-perijinan relatif kecil karena masih merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	: 985,46	Km
- Jalan Provinsi	: 899,77	Km
- Pelabuhan Laut	: 27	
- Pelabuhan Udara	: 13	
- Listrik	: 285 816 791	MW
- Telekomunikasi	: 36 553	SST

Prospek Investasi:

- Perikanan dan Kelautan: Kab. Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tengah (Malteng), Seram Bagian Barat (SBB), Buru, Buru Selatan (Bursel), Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD), Aru, Maluku Tenggara (Malra), Kota Ambon dan Tual jenis kegiatan budidaya dan tangkap laut dan pesisir seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, mutiara, teripang dan rumput laut.
- Perkebunan: Kab. SBT, SBB, Malteng, Bursel, Buru, MTB dan Aru jenis rempah-rempah, tanaman umur panjang dan hortikultura.
- Peternakan Sapi, Kuda, Babi: Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel, MTB, MBD dan Aru
- Pariwisata dan Perhotelan: Kab. SBT, Malteng, SBB, Buru, Bursel, MTB, MBD, Aru, Malra, Kota Ambon dan Tual

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	14	280.040,2
PMA	12	42.584,2

Profil Investasi Propinsi Maluku Utara



Gubernur : **Drs. H. Thaib Armaiyn**
IPMP : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
Alamat : Jln. Saleh Efendi Kampung Pisang Ternate
Telpon : (0921) 328559, Fax: (0921) 328080
Website : www.bkpmmdmalutprov.go.id
Kabupaten/Kota : 6 Kab./2 Kota
Penduduk (2007) : 944.300 Jiwa
Luas Wilayah : 145.801,1 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 3.346.523
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 6,01%
IPM (2007) : 67,93

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah:

1. Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan untuk investasi PMDN/PMA dan non-PMDN/PMA.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi
3. Koordinasi Investasi Daerah.
4. Bimbingan dan Fasilitas Penanaman Modal

Ketersediaan Infrastruktur:

Jalan Negara	458,21 km	Km
Jalan Provinsi	1.816,67 km	Km
Pelabuhan Laut	39	
Pelabuhan Udara	6	
Listrik	67.035.050	KVA
Telekomunikasi	19.226	SST

Prospek Investasi:

- Perikanan tangkap, darat, pengalengan ikan di Kabupaten Halmahera Selatan, Tambak ikan Nila di Kabupaten Halmahera Timur
- Pertambangan emas dan nikel di Kabupaten Halmahera
- Pariwisata sejarah di Kota Tidore/Ternate
- Perkebunan jagung di Kabupaten Halmahera Utara, Kedelai di Kabupaten Halmahera Barat

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	3	77.931,1
PMA	1	500

Profil Investasi Propinsi Papua Barat



Gubernur : **Abraham O Atururi**
IPMP : Biro Perekonomian dan Investasi
Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. Siliwangi No.1 Manokwari
Telpon : (0986) 211719, Fax: (0986) 213214
Website : www.papuabaratprov.go.id
Kabupaten/Kota : 8 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 716.000 Jiwa
Luas Wilayah : 126.097,00 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp 14.483.032
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 8,61 %
IPM (2007) : 67,1

Peran Instansi Penanaman Modal

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi;
2. Koordinasi Investasi daerah.

Ketersediaan Infrastruktur:

- Jalan Negara	615, 810	Km
- Jalan Provinsi	686,175	Km
- Pelabuhan Laut	3 (Tiga)	
- Pelabuhan Udara	7 (Tujuh)	
- Listrik	182,692	MW
- Telekomunikasi	84,156	SST

Prospek Investasi:

- Peternakan Sapi: Kab. Manokwari, Kab. Fakfak, Kab. Sorong.
- Perkebunan Kelapa Sawit: Kab. Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni
- Perikanan Tangkap: Kab. Sorong, Raja Ampar, Fakfak, Kaimana
- Pariwisata dan Perhotelan: Kota Manokwari, Sorong, Raja Ampat
- Pertambangan Migas: Teluk Bintuni, Raja Ampat

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	6	131.773,8
PMA	15	546.158,2

Profil Investasi Propinsi Papua



Gubernur : **Barnabas Suebu, SH**
IPMP : Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID)
Alamat : Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Jayapura
Telpon : (0967) 533600, Fax: (0967) 536943
Website : www.papua.go.id
Kabupaten/Kota : 26 Kab./1 Kota
Penduduk (2007) : 2.015.600 Jiwa
Luas Wilayah : 317.062 Km²
PDRB Perkapita (2007) : Rp. 27.468.415
Laju Pertumbuhan PDRB (2007) : 4,28%
IPM (2007) : 63,10

Peran Badan Promosi dan Investasi Daerah:

1. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal melalui: pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal, monitoring kegiatan perusahaan PMA/PMDN, Pembentukan Tim Pengawasan Penanaman Modal
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi, Mengadakan kegiatan promosi, Kordinasi Penanganan Masalah Investasi.

Ketersediaan Infrastruktur

- Jalan Negara	1.848,25	Km
- Jalan Provinsi	1.562,13	Km
- Pelabuhan Laut	9	
- Pelabuhan Udara (Perintis & Non Perintis)	16	
- Listrik	350,12 Juta	KWH
- Telekomunikasi	32.531	SST Telkom

Prospek Investasi

- Infrastruktur: Jalan trans Papua, PLTA Mamberamo, dll.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus: Biak (Teluk Cenderawasih), Mimika-Merauke (Pantai Selatan), Jayapura-Kerom (Pantai Utara)
- Pengembangan Kawasan Pariwisata: Danau Sentani, Taman Laut, Teluk Cenderawasih, Wisata Budaya (Wamena), Peninggalan Perang Dunia II (Jayapura/Biak), Bovendigoel.
- Industri: Agro, Hasil hutan dan laut, Pulp dan kertas, bioetanol.
- Pertanian: Persawahan, Pembenihan Ternak, Sawit, Perikanan.

Realisasi Investasi 1990-2007:

Uraian	Proyek	Investasi
PMDN	14	131.773,8
PMA	11	527.735,5